



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2022



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

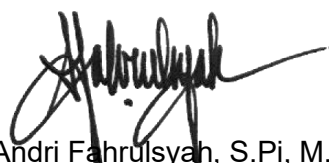
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan IV Tahun 2022 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan IV Tahun 2022 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 Januari 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2022, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾ Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Operasi Armada pengawasan SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya

Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2022, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 25 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan IV Tahun 2022, dari 25 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 25 (delapan) IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%).

Pada tanggal 14 Desember tahun 2022 terdapat revisi anggaran Stasiun PSDKP Belawan dari Rp.**34.265.069.000,-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) menjadi Rp.**31.915.391.000,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu*). Anggaran yang direvisi tersebut merupakan anggaran yang sebelumnya di *Automatic Adjustmnet (AA)*. Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Desember 2022 sebesar **99,91%** atau sebesar Rp **31.886.058.309,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp.**31.915.391.000,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Ringkasan Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual	4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 – 2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022	13
B. Analisis Pencapaian Kinerja	18
C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara	108
D. Efisiensi	119
E. Akuntabilitas Keuangan	120
IV. PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.....	9
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022.....	13
Tabel 3. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	18
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 dan 2022.....	19
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 7. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022.....	21
Tabel 8. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.....	23
Tabel 9. Pelaku Usaha pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022.....	26
Tabel 10. Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022	28
Tabel 11. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022 .	32
Tabel 12. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.....	33
Tabel 13. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya Tahun 2022.....	35
Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	41
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 dan 2022.....	42
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 17. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Penangkapan Ikan.....	43
Tabel 18. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2022	44
Tabel 19. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pembudidaya Ikan.....	48
Tabel 20. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2022	49
Tabel 21. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengolahan Ikan	58

Tabel 22. Pelaku Usaha Subsektor Pengolahan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan	59
Tabel 23. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.....	65
Tabel 24. Pelaku Usaha Subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan.....	66
Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pokmaswas Yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP.....	71
Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pokmaswas Yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP Dengan Renstra Tahun 2020-2024	71
Tabel 27. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif ..	72
Tabel 28. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024	73
Tabel 29. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas Tahun 2022.....	75
Tabel 30. Capaian IKU Indeks Operasional Kapal Pengawas Tahun 2022.....	75
Tabel 31. Capaian Hari Operasional Speedboat Pengawas Tahun 2022.....	76
Tabel 32. Capaian IKU Indeks Operasional Speedboat Pengawas Tahun 2022.....	77
Tabel 33. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2022.....	79
Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan renstra tahun 2020-2024.....	80
Tabel 35. Perawatan KP Hiu 01 ,KP Hiu 08 dan KP Hiu 16 Tahun 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80
Tabel 36. Perawatan Speedboat Pengawasan Tahun 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	81
Tabel 37. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif.....	84
Tabel 38. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	85
Tabel 39. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan.....	88
Tabel 40. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024	94
Tabel 41. Pencapaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	95
Tabel 42. Perbandingan IK Ke-14 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 43. Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan 2019 – 2022	98
Tabel 44. Perbandingan Capaian IK “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	98
Tabel 45. Perbandingan Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	99
Tabel 46. Perbandingan Capaian IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” dengan renstra tahun 2020-2024	100
Tabel 47. Perbandingan Capaian IK “Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	101
Tabel 48. Perbandingan Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024.....	102

Tabel 49. Perbandingan Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024.....	103
Tabel 50. Perbandingan Capaian IK “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	104
Tabel 51. Perbandingan Capaian IK “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” dengan renstra tahun 2020-2024	106
Tabel 52. Perbandingan Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	107
Tabel 53. Perbandingan Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	108
Tabel 54. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Desember 2022	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Hasil SKM Pengguna Layanan SLO TW IV Tahun 2022.....	93
Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	95
Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan	104
Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	107

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi

Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

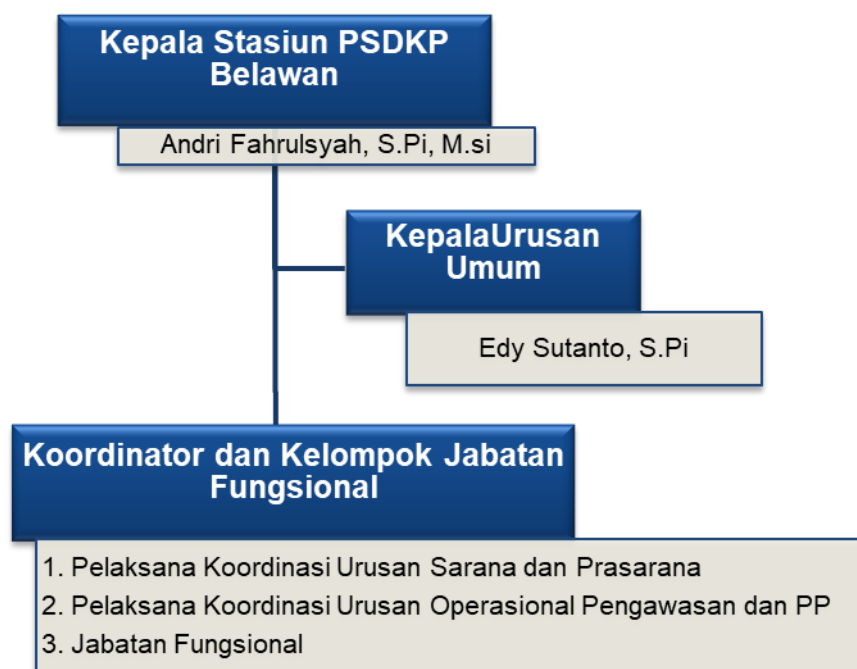
d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada **Gambar 1** dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
- b. Penindakan/ pengenaan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran/kejahatan.
- c. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 6 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 23A/ KEP-DJPSDKP/ 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakan melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2022 berjumlah Sasaran Kegiatan (SK) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 25 (Dua Puluh Lima). Pada tahun berjalan terdapat revisi anggaran dari Rp.**34.265.069.000,-** (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) menjadi Rp.**31.915.391.000,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*). Adanya revisi anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya revisi target pada IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas. Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya sebelum dan sesudah revisi pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN					
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN					
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN					
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5	85
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87,5	85
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi
	SDKP yang sesuai ketentuan				
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi	
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP					
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90	90
		ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	21
		ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	1
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81	81

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2022

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (dua puluh lima) IKU. Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian (%)	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN							
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100,00%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN							
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100,00%
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN							
SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	87	87	100	114,94%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian (%)
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	85	85	89,7	105,53%
		ISK3.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	85	85	92,12	105,29
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	90	100	111,11%
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	100	107,53%
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	100	107,53%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian (%)	
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	100	107,53%
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	80	100	120%
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	80	100	120%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP							
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	87,53	109,41%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian (%)
		ISK5.1.2 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	90,92	113,65%
		ISK5.1.3 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	75	77,87	103,83%
		ISK5.1.4 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	77	77	82,17	106,71%
		ISK5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90	90	98,04	108,93%
		ISK5.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	21	26,67	120,00%
		ISK5.1.7 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	1	1	100%
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	75	100	120%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian (%)
		ISK5.1.9 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	75	75	100	120%
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	86	86	97,78	113,70%
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100	120%
		ISK5.1.12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89	89	93,7	105,36%
		ISK5.1.13 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	81	81	86,25	106,48%

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor \geq 100)
2		Hati-hati ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3		Buruk (Skor $<$ 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan IV Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU Ke-1 ini diperoleh dari capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW IV tahun 2022 IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 100%. Capaian pada TW IV sama dengan yang ditargetkan pada TW IV Tahun 2022 yaitu 100% dengan persentase capaiannya sebesar 100%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kompetensi telah diselenggarakan Bimtek.

Pencapaian IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW IV tahun 2022 sama dengan capaian TW IV tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%. Capaian IKU ke-1 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Presentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Persentase (%)	Capaian tahun 2021	Persentase (%)
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada tahun 2022 lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Perbandingan capaian pelaku usaha kelautan yang di periksa pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa	2	4

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
	kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	12	4
3	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	3	5
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	9	13
5	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	12	0
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		38	26

Berkurangnya jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 karena:

1. Pada tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan tidak memiliki target pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi sedangkan pada tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan memiliki target pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi. Jumlah pelaku usaha kawasan konservasi yang diperiksa kepatuhannya oleh Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 berjumlah 12 pelaku usaha, sedangkan pada tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kawasan konservasi karena tidak memiliki target pada pengawasan tersebut.
2. Anggaran untuk pengawasan sumberdaya kelautan pada tahun 2022 lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Pada tahun 2022 anggaran untuk pengawasan sumberdaya kelautan sebesar Rp. 93.998.000 sedangkan pada tahun 2021 anggarannya sebesar Rp. 267.000.000,-

IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 6** berikut :

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	16 pelaku usaha.	95	100	100	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 245.347.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 244.232.483 atau sebesar 99,55%. Capaian ini terhitung efisiensi dikarenakan jumlah realisasi yang melebihi target yang sudah ditentukan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,55%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Unit Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Adapun capaian pengawasan unit usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 yaitu 3 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 sebagaimana **Tabel 7** dibawah ini:

Tabel 7. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
UD. Alam Biru Indah	- Perusahaan ini beralamat di Jl. Brigjen Z Hamid Komplek Citra Baru, No 39, Titi Kuning, Medan, Sumatera Utara;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - UD. Alam Biru Indah memiliki SIPJI untuk sirip hiu dan pari; - Perusahaan ini telah memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindungi yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 242/DJPRL.5/PRL.430/III/2022 tanggal 29 Maret 2022; - Sirip ikan hiu diperoleh pengambilan dari alam yang berasal dari Sibolga, Labuhan Haji, Meulaboh, dan Aceh; - Tujuan pemasaran ekspor yaitu Hongkong; - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perizinan lengkap, lokasi usaha sesuai, Jenis Kegiatan pemanfaatan telah sesuai, Jenis dan Jumlah sirip ikan hiu yang dimanfaatkan sesuai sehingga pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan dan peraturan.
UD. Amanah Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini beralamat di Jl Sunggal Komplek Sunggal Centre, No 1-B, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara; - Kegiatan pengawasan dilakukan pada UD Amanah Utama yang memiliki SIPJI Perdagangan DN/LN terhadap pemanfaatan sirip ikan hiu dan teripang CITES II; - UD. Amanah Utama memiliki SIPJI untuk teripang dan sirip hiu dan pari, namun pada saat dilakukan pengawasan bahwa pada tahun 2022 perusahaan ini hanya menjalankan SIPJI teripang; - UD. Amanah Utama telah memiliki Surat Keputusan terkait Kuota pemanfaatan ekspor untuk komoditas Teripang yang masuk dalam kategori CITES II yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, KLHK Nomor SK.15/KKHSG/PSG1/KSA.2/2/2022 tanggal 08 Februari 2022; - Teripang diperoleh dari penangkapan di alam yang berasal dari Sibolga; - Tujuan pemasaran ekspor yaitu Malaysia; - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perizinan, lokasi usaha, Jenis Kegiatan pemanfaatan, Jenis dan Jumlah teripang yang dimanfaatkan dan masuk pada kategori CITES II telah sesuai dan lengkap sehingga pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Perairan Kabupaten Bengkalis (<i>Tenualosa macrura</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Riau (UPT

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II) dan BPSPL Padang; <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit kapal dengan alat tangkap gillnet yaitu: 1. KM. tanpa nama dengan nakhoda Ali, 2. KM. Aldi dengan nakhoda Syamsudin, 3. KM. tanpa nama dengan nakhoda Zulkifli dan 4. KM. tanpa nama dengan nakhoda Joseph; - Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap nelayan tersebut tidak ditemukan adanya hasil tangkapan ikan terubuk. Pengawas Perikanan tetap memberikan sosialisasi Kepmen Kepmen-KP No.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) kepada para nelayan.

Dengan dilaksanakannya pengawasan pada TW IV tahun 2022 kepada 3 pelaku usaha, maka selama tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan unit usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 sebagaimana **Tabel 8** dibawah ini:

Tabel 8. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
DAS Barumun di sekitar Panai Hulu dan Panai Tengah dan monitoring pelaku pengumpul ikan dilakukan di wilayah Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara gabungan bersama oleh tim Satwas. PSDKP Asahan, tim dari Dinas Perikanan Labuhan Batu, dan monitoring dari BPSPL Padang; - Pemeriksaan dilakukan terhadap 7 kapal nelayan kecil (tanpa nama) yang melakukan penangkapan ikan di DAS Barumun. Dari tujuh kapal yang diperiksa terdapat 6 kapal yang menggunakan jaring gillnet terubuk dan 1 kapal yang menggunakan alat tangkap jaring gulamah. Pada kegiatan ini petugas menyampaikan aturan terkait larangan penangkapan ikan Terubuk pada periode di bulan tertentu dengan cara lisan dan membagikan Selebaran (leaflet) serta menghimbau para nelayan untuk mematuhi; - Hasil tangkapan dari beberapa nelayan yang diperiksa ditemukan jenis ikan Terubuk dengan berat rata-rata 700- 800 gram dengan kondisi mati segar; - Tindak Lanjut terhadap kapal perikanan/nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan Terubuk di periode larangan, Pengawas Perikanan memerintahkan untuk segera mengangkat alat tangkapnya dan memerintahkan untuk

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>menghentikan kegiatan perikanan dan menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi peraturan terkait larangan penangkapan terubuk pada periode waktu yang ditetapkan sesuai Kepmen Nomor 43/KEPMEN KP/2016.</p>
UD. Alam Biru Indah	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini beralamat di Jl. Brigjen Z Hamid Komplek Citra Baru, No 39, Titi Kuning, Medan, Sumatera Utara; - UD. Alam Biru Indah memiliki SIPJI untuk sirip hiu dan pari; - Perusahaan ini telah memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindungi yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 242/DJPRL.5/PRL.430/III/2022 tanggal 29 Maret 2022; - Sirip ikan hiu diperoleh pengambilan dari alam yang berasal dari Sibolga, Labuhan Haji, Meulaboh, dan Aceh; - Tujuan pemasaran ekspor yaitu Hongkong; - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perizinan lengkap, lokasi usaha sesuai, Jenis Kegiatan pemanfaatan telah sesuai, Jenis dan Jumlah sirip ikan hiu yang dimanfaatkan sesuai sehingga pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan dan peraturan.
UD. Amanah Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini beralamat di Jl Sunggal Komplek Sunggal Centre, No 1-B, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara; - Kegiatan pengawasan dilakukan pada UD Amanah Utama yang memiliki SIPJI Perdagangan DN/LN terhadap pemanfaatan sirip ikan hiu dan teripang CITES II; - UD. Amanah Utama memiliki SIPJI untuk teripang dan sirip hiu dan pari, namun pada saat dilakukan pengawasan bahwa pada tahun 2022 perusahaan ini hanya menjalankan SIPJI teripang; - UD. Amanah Utama telah memiliki Surat Keputusan terkait Kuota pemanfaatan ekspor untuk komoditas Teripang yang masuk dalam kategori CITES II yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, KLHK Nomor SK.15/KKHSG/PSG1/KSA.2/2/2022 tanggal 08 Februari 2022; - Teripang diperoleh dari penangkapan di alam yang berasal dari Sibolga; - Tujuan pemasaran ekspor yaitu Malaysia; - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perizinan, lokasi usaha, Jenis Kegiatan pemanfaatan, Jenis dan Jumlah teripang yang dimanfaatkan dan masuk pada kategori CITES II

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	telah sesuai dan lengkap sehingga pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Perairan Kabupaten Bengkalis (<i>Tenualosa macrura</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Riau (UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II) dan BPSPL Padang; - Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) unit kapal dengan alat tangkap gillnet yaitu: 1. KM. tanpa nama dengan nakhoda Ali, 2. KM. Aldi dengan nakhoda Syamsudin, 3. KM. tanpa nama dengan nakhoda Zulkifli dan 4. KM. tanpa nama dengan nakhoda Joseph; - Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap nelayan tersebut tidak ditemukan adanya hasil tangkapan ikan terubuk. Pengawas Perikanan tetap memberikan sosialisasi Kepmen Kepmen-KP No.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) kepada para nelayan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.847.040- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.17.848.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 99,99%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 99,99%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 yaitu 2 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 sebagaimana **Tabel 9** dibawah ini:

Tabel 9. Pelaku Usaha pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Pantai Woong Rame	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Woong Rame berada di Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; - Pantai Woong Rame telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Kota Medan tanggal 23 Juni 2021; - Pantai Woong Rame telah memiliki NIB nomor 1201000662533 tanggal 23 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; - Luas area sebesar 2 Ha dengan titik koordinat 3°39.5180'N 98°58.2300'E; - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ini tidak ditemukan nya kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan serta tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha.
PT. Unicon Insan Rekadaya	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Unicon Insan Rekadaya yang beralamat di Jl. Melati Indah No C 10, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; - Pengawasan tidak dilakukan di lokasi lahan konsesi milik perusahaan karena saat ini belum ada aktifitas di lokasi tersebut; - Petugas diterima oleh Bapak Iwan dan Bapak Mashudi selaku Komisaris, serta Bapak Dony Saputra selaku Direktur dari PT. Unicon Insan Rekadaya. Perusahaan ini bergerak dalam usaha penambangan pasir laut; - PT. Unicon Insan Rekadaya memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1810210030992 Tanggal 25 Oktober 2021 dengan Kode KBLI 08104-Penggalian Pasir, dengan klasifikasi resiko Tinggi; - PT. Unicon Insan Rekadaya telah memiliki Dokumen Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan Komoditas Pasir Laut dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Republik Indonesia dengan Nomor 229/MB.03/DJB/WIUP/2022 Tanggal 10

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>Februari 2022 dengan Luas Lahan konsesi 99,46 Ha, dengan rencana kapasitas produksi 450.000 m³/Tahun. Artinya usaha penambangan pasir laut yang dilakukan oleh perusahaan ini masih dalam tahap pencadangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Unicon Insan Rekadaya telah mengajukan permohonan peningkatan Status WIUP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada , Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Republik Indonesia pada Tanggal 12 Februari 2022 dan telah lolos evaluasi teknis dan masuk tahap pengesahan per tanggal 6 April 2022, namun hingga saat ini, dokumen IUP tersebut belum juga diterima oleh pihak perusahaan; - Hasil konfirmasi dengan pihak ESDM menyatakan bahwa dokumen IUP eksplorasi tersebut belum bisa diterbitkan karena sedang proses integrasi/koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan; - PT. Unicon Insan Rekadaya juga telah memperoleh Arahan Persetujuan Lingkungan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor Surat S.1108/PDLUK/P25/PLA.4/4/2022 Tanggal 22 April 2022. Adapun ini Surat tersebut menyatakan agar PT. Unicon Insan Rekadaya mengurus Dokumen UKL-UPL sebagai izin lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau, sebelum kegiatan eksplorasi dimulai; - PT. Unicon Insan Rekadaya belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mereka menyatakan baru mengetahui adanya perizinan berusaha tersebut. Dari penesuluran dokumen pernyataan mandiri mengenai tata ruang, petugas menduga mengapa opsi PKKPRL tidak muncul pada saat pengurusan perizinan berusaha pada aplikasi OSS dikarenakan perusahaan mengisi semua lokasi usaha berada di daratan, padahal usaha penambangan pasir laut dilakukan di ruang laut; - Polsus PWP3K menyampaikan bahwa PT. Unicon Insan Rekadaya harus merevisi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan melengkapinya dengan PKKPRL. Adapun ketentuan dan persyaratan dapat dilihat pada

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	PERMEN-KP Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; - Polsus PWP3K juga menyampaikan bahwa sebelum dipenuhinya perizinan berusaha berupa izin dasar (data NIB yang telah direvisi), Izin Lokasi (PKKPR dan IUP) serta Izin Pengelolaan (UKL-UPL), PT. Unicon Insan Rekadaya agar tidak melakukan kegiatan apapun di lahan konsesi laut yang telah mereka miliki.

Dengan dilaksanakannya pengawasan pada TW IV tahun 2022 kepada 2 pelaku usaha, maka selama tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan kepatuhannya sebanyak 4 pelaku usaha. Rincian unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 sebagaimana **Tabel 10** dibawah ini:

Tabel 10. Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Pantai Romantis	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Romantis beralamat di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; - Pantai Romantis telah memiliki Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Kelompok Masyarakat Wisata Hutan dan Pantai Romantis dengan Nomor Pihak Pertama : 522/1399/UPT.KPH-II/2018 dan Nomor Pihak Kedua : 02/ROMANTIS/2018 tanggal 7 Sept 2018; - Luas area Pantai Romantis 3,58 Ha; - Untuk pengelolaan limbahnya dilakukan dan di jalankan secara mandiri. Pada saat di lakukan pengawasan, sampah masih di letakkan pada salah satu lokasi dan belum terdapat bak/tempat pengelolaan sampah yang memadai. Pengawas perikanan telah memberikan rekomendasi agar pihak Pantai Romantis membangun bak untuk tempat penampungan sampahnya.
CV. Pantai Bali Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Pantai Bali Lestari beralamat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara; - Menurut pengelola yaitu bapak Susiandy (Asiang), CV. Pantai Bali Lestari di Kelola oleh

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>Kelompok Objek Wisata Pantai Bali Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8547/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Objek Wisata Pantai Bali Lestari Seluas ± 25 (Dua Puluh Lima) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 14 (Empat Belas) Hektare dan Hutan Lindung (HP) Seluas ± 11 (Sebelas) Hektare di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV. Pantai Bali Lestari juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha Nomor 8120110261482 tanggal 18 Desember 2018 untuk Karaoke, taman rekreasi/ Taman Wisata dan Nomor Induk Berusaha Nomor 8120017271199 tanggal 19 Desember 2018 untuk Restoran dan Warung Makan; - Tidak ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan/perairan di sekitar CV. Pantai Bali Lestari.
Pantai Woong Rame	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Woong Rame berada di Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; - Pantai Woong Rame telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Kota Medan tanggal 23 Juni 2021; - Pantai Woong Rame telah memiliki NIB nomor 1201000662533 tanggal 23 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; - Luas area sebesar 2 Ha dengan titik koordinat 3°39.5180'N 98°58.2300'E; - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ini tidak ditemukan nya kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan serta tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha.
PT. Unicon Insan Rekadaya	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Unicon Insan Rekadaya yang beralamat di Jl. Melati Indah No C 10, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; - Pengawasan tidak dilakukan di lokasi lahan konsesi milik perusahaan karena saat ini belum ada aktifitas di lokasi tersebut; - Petugas diterima oleh Bapak Iwan dan Bapak Mashudi selaku Komisaris, serta Bapak Dony Saputra selaku Direktur dari PT. Unicon Insan Rekadaya. Perusahaan ini bergerak dalam usaha penambangan pasir laut;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Unicon Insan Rekadaya memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1810210030992 Tanggal 25 Oktober 2021 dengan Kode KBLI 08104-Penggalian Pasir, dengan klasifikasi resiko Tinggi; - PT. Unicon Insan Rekadaya telah memiliki Dokumen Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan Komoditas Pasir Laut dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Republik Indonesia dengan Nomor 229/MB.03/DJB/WIUP/2022 Tanggal 10 Februari 2022 dengan Luas Lahan konsesi 99,46 Ha, dengan rencana kapasitas produksi 450.000 m³/Tahun. Artinya usaha penambangan pasir laut yang dilakukan oleh perusahaan ini masih dalam tahap pencadangan; - PT. Unicon Insan Rekadaya telah mengajukan permohonan peningkatan Status WIUP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada , Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Republik Indonesia pada Tanggal 12 Februari 2022 dan telah lolos evaluasi teknis dan masuk tahap pengesahan per tanggal 6 April 2022, namun hingga saat ini, dokumen IUP tersebut belum juga diterima oleh pihak perusahaan; - Hasil konfirmasi dengan pihak ESDM menyatakan bahwa dokumen IUP eksplorasi tersebut belum bisa diterbitkan karena sedang proses integrasi/koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan; - PT. Unicon Insan Rekadaya juga telah memperoleh Arahan Persetujuan Lingkungan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor Surat S.1108/PDLUK/P25/PLA.4/4/2022 Tanggal 22 April 2022. Adapun ini Surat tersebut menyatakan agar PT. Unicon Insan Rekadaya mengurus Dokumen UKL-UPL sebagai izin lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau, sebelum kegiatan eksplorasi dimulai; - PT. Unicon Insan Rekadaya belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mereka menyatakan baru mengetahui adanya perizinan berusaha tersebut. Dari penesuluran dokumen pernyataan mandiri mengenai tata

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>ruang, petugas menduga mengapa opsi PKKPRL tidak muncul pada saat pengurusan perizinan berusaha pada aplikasi OSS dikarenakan perusahaan mengisi semua lokasi usaha berada di daratan, padahal usaha penambangan pasir laut dilakukan di ruang laut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsus PWP3K menyampaikan bahwa PT. Unicon Insan Rekadaya harus merevisi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan melengkapinya dengan PKKPRL. Adapun ketentuan dan persyaratan dapat dilihat pada PERMEN-KP Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; - Polsus PWP3K juga menyampaikan bahwa sebelum dipenuhinya perizinan berusaha berupa izin dasar (data NIB yang telah direvisi), Izin Lokasi (PKKPRL dan IUP) serta Izin Pengelolaan (UKL-UPL), PT. Unicon Insan Rekadaya agar tidak melakukan kegiatan apapun di lahan konsesi laut yang telah mereka miliki.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.577.958,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.28.578.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 100%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW IV tahun 2022 yaitu 1 pelaku usaha. Rincian unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 sebagaimana **Tabel 11** dibawah ini:

Tabel 11. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut Yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW IV Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha yang diawasi adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah memiliki dokumen PKKPRL nomor memiliki dokumen persetujuan konfirmasi KKPRL absah dengan nomor: 17122110511200001 tanggal 16 Desember 2021 terkait: interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan. Panjang kabel laut adalah 0,75 km (nol koma tujuh lima kilometer) dengan kedalaman 15 meter; - PT. PLN telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2022; - PT. PLN sudah menyampaikan laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi sebagaimana kewajiban PLN yang dituangkan pada lampiran KKPRL; - Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh PLN pada kegiatan Interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan sudah memiliki dokumen Persetujuan/KKPRL yang absah dan dilakukan dilokasi yang sesuai peruntukannya; - Rekomendasi yang diberikan Polsus PWP3K kepada PLN adalah agar menyampaikan laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum tanggal 16 Desember 2022.

Dengan dilaksanakannya pengawasan pada TW IV tahun 2022 kepada 1 pelaku usaha, maka selama tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 5 pelaku

usaha. Rincian unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada tahun 2022 sebagaimana **Tabel 12** dibawah ini:

Tabel 12. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Kelompok Tani Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan mangrove di daerah ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Rajawali Mandiri dengan luas ± 217 Ha; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6425/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019; - Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan kepada 106 kepala keluarga dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Ditemukan kerusakan hutan mangrove akibat abrasi.
Nelayan Rajawali Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan mangrove di daerah ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Rajawali Mandiri dengan luas ± 217 Ha; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6425/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019; - Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan kepada 106 kepala keluarga dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Ditemukan kerusakan hutan mangrove akibat abrasi.
Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove dengan luas ± 346 Ha; - Dalam kegiatan pengawasan ini pengawas perikanan berkoordinasi dengan Ketua KTH Cinta Mangrove Bapak Rustam Efendi; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10270/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 20 Desember 2019; - Kelompok ini beranggotakan 47 KK dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove mengelola kawasan hutan dengan melakukan beberapa jenis pemanfaatan seperti pembangunan nursery mangrove dan wisata tracking mangrove.
Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur dengan luas ± 82 Ha; - Izin pengelolaan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3702/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 31 Mei 2018; - Kelompok ini beranggotakan 41 KK dengan izin pemanfaatan selama 35 tahun; - Kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove mengelola kawasan hutan dengan melakukan pemanfaatan untuk wisata tracking mangrove.

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha yang diawasi adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah memiliki dokumen PKKPRL nomor memiliki dokumen persetujuan konfirmasi KKPRL absah dengan nomor: 17122110511200001 tanggal 16 Desember 2021 terkait: interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan. Panjang kabel laut adalah 0,75 km (nol koma tujuh lima kilometer) dengan kedalaman 15 meter; - PT. PLN telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2022; - PT. PLN sudah menyampaikan laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi sebagaimana kewajiban PLN yang dituangkan pada lampiran KKPRL; - Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh PLN pada kegiatan Interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan sudah memiliki dokumen Persetujuan/KKPRL yang absah dan dilakukan dilokasi yang sesuai peruntukannya; - Rekomendasi yang diberikan Polsus PWP3K kepada PLN adalah agar menyampaikan laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum tanggal 16 Desember 2022.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.454.160,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.26.065.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 93,82%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 93,82%

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas

Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

d. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yang diperiksa kepatuhannya pada TW IV tahun 2022 yaitu 0 pelaku usaha. Namun pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 13 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana **Tabel 13** dibawah ini:

Tabel 13. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Global Pasific Seafood Industry	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Global Pasific Seafood Industry berada di Kawasan Industri Medan; - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan ikan beku; - PT. Global Pasific Seafood Industry telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM. - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha nomor 8120108860184 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. - UKL-UPL Nomor 660.T/491/660.I/DS/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. - Izin Lingkungan Nomor 8120108860184, tanggal 28 Januari 2013 yang diterbitkan Bupati Deli Serdang.
PT. Sorby International Medan	<ul style="list-style-type: none"> - PT Sorby International Medan beralamat di Jl. Pulau Irian Kompleks Miel Nusantara I, Kawasan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>Industri Medan I No.3A, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan dan pemasaran ikan yang memiliki tiga KBLI yaitu 10213 (Industri pembekuan ikan), 46206 (Perdagangan besar hasil perikanan), dan 10293 (Industri pembekuan biota air lainnya); - PT Sorby International Medan telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM. - Dokumen Perizinan yang dimiliki perusahaan ini adalah : - NIB nomor 9120105192189 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 28 Januari 2019. - Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati Kab. Deli Serdang (Kode KBLI 10213 dan 46206) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kode KBLI 10293) pada tanggal 28 Februari 2018.
PT. Seafood Sumatera Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Seafood Sumatera Perkasa beralamat di Jl. Titi Pahlawan Nomor 38 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara; - PT. Seafood Sumatera Perkasa termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang pengolahan, telah memiliki NIB Nomor 8120002962402 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; - PT. Seafood Sumatera Perkasa memiliki Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup Nomor 660/5993 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; - PT. Seafood Sumatera Perkasa dalam pengelolaan limbahnya telah memiliki IPAL Mandiri.
PT. Red Ribbon Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Red Ribbon Indonesia beralamat di Jalan Sulawesi Kasawan Industri Medan (KIM) I; - PT. Seafood Sumatera Perkasa memiliki Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Nomor 660/5993 tanggal 660/5569 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa pembekuan Udang dan paha kodok;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Red Ribbon Indonesia memiliki NIB Nomor 8120004872553 tanggal 25 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; - PT. Red Ribbon Indonesia telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik, dimana limbah tersebut telah di alirkan melalui pipa ke tempat IPAL terpadu KIM.
PT. Halindo Berjaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Halindo Berjaya Mandiri di Jl. Burhanuddin Lk.II kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara; - PT. Halindo Berjaya Mandiri telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120101890393 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS Republik Indonesia; - PT. Halindo Berjaya Mandiri memiliki Izin Lingkungan nomor 503/007/SSPK-IL/DPM-PPTSP/2020 yang diterbitkan oleh tanggal 04 Januari 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai; - PT. Halindo Berjaya Mandiri dalam pengelolaan limbahnya telah memiliki IPAL Mandiri.
PT. Anugerah Keramat Indah	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Anugerah Keramat Indah beralamat di Jl. Yos Sudarso Lk. V, Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara; - PT. ini telah memiliki dokumen perizinan, yaitu NIB dengan Nomor 8120002982202 dan SIUP Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS, Izin Lingkungan Nomor 503/0001/IL/DPM-PPTSP/2020 dari DPM PPTSP Kota Tanjungbalai pada tanggal 14 Februari 2020; dan Dokumen UKL-UPL yang sudah direkomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dengan Nomor 660.2/198/DisLH/2020 tanggal 13 Februari 2020; - Perusahaan memiliki IPAL Mandiri.
Semangat Baru	<ul style="list-style-type: none"> - UPI Semangat Baru beralamat di Jl. Garuda LK. IV Kel. Beting Kuala Kapias, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara; - Semangat Baru telah memiliki dokumen perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200872086 dengan KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS Republik Indonesia; - Semangat Baru Tidak memiliki IPAL/UKL-UPL tetapi sudah mendapat rekomendasi atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dengan

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<p>Nomor 660.2/131/DisLH/2020 tanggal 30 Januari 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan Semangat Baru diterbitkan diterbitkan oleh LPP OSS berdasarkan surat persetujuan pemenuhan komitmen SPP Komitmen Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai dengan nomor 503/0014/SSPK-IL/DPM-PPTSP/2020 pada tanggal 27 Juli 2020; - Semangat Baru bergerak di bidang penanganan dan pembekuan ikan, dimana air limbah yang dihasilkan merupakan air pencucian ikan.
PT. Medan Tropical Canning and Frozen Industries	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Medan Tropical Canning and Frozen Industries beralamat di Jln. K.L. Yos Sudarso KM. 10.5, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan merupakan perusahaan dengan modal asing (PMA). Jenis produk olahan perusahaan PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries ini berupa produk pembekuan dan pengalengan yang meliputi Frozen Pelagis Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Shrimp, Frozen Chepalopod, Frozen Cooked Chepalopod, Canned Shrimp, Canned Tuna. Hasil pengolahan ikan ini di ekspor ke negara USA, Canada, Eropa dan China; - PT. Medan Tropical Canning and Frozen Industries memiliki NIB nomor 8120101920359 tanggal 5 Spetember 2018 dan rekomendasi dokumen UKL/UPL dari BLH Kota Medan nomor 660/1078/BLH/III/2013 tanggal 4 April 2013; - PT. Medan Tropical Canning and Frozen Industries telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik, dimana limbah tersebut telah di alirkan melalui pipa ke tempat IPAL. terpadu KIM.
PT. Winson Prima Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Winson Prima Sejahtera terletak di Kawasan PT Kawasan Industri Medan 03°40'39.66"N 098°41'3443"E; - PT Winson Prima Sejahtera termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang Pembekuan Ikan; - PT Winson Prima Sejahtera termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang Pembekuan Ikan; - PT Winson Prima Sejahtera memiliki NIB nomor 9120303362805 tanggal dan izin Lingkungan 503.570/0037/IL/DPMPTSP-DS/IV/2017, tanggal 28 April 2017; - Pengolahan air limbah dilakukan dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Ayu Bumi Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Ayu Bumi Sejati beralamat di Jln. Medan Belawan KM. 17,5 Pekan Labuhan, Kec. Medan Belawan, Kotamadya Medan; - Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan produk udang serta paha kodok; - Dokumen Perizinan yang dimiliki perusahaan ini adalah NIB nomor 0220107641955 tanggal 15 Juni 2020 dan Izin Kingkungan nomor 660/3156/BLH//X/2013 tanggal 3 Oktober 2013; - Dalam pengelolaan limbahnya, PT. Ayu Bumi Sejati memiliki IPLA mandiri.
PT. Bumi Menara Internusa	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bumi Menara Internusa beralamat di KIM II, Jl.Pulau Sumbawa II No.5A, Kec. Percut Sei Tuan; - Perusahaan ini bergerak di bidang Industri Pengalengan dan Biota Perairan Lainnya; - Perusahaan ini mempunyai Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor TL.P/205/IV/2019 instansi penerbit Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang tanggal 9 April 2019; - Perusahaan ini telah memiliki Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Deli Serdang No. 503.570/0006/IL/DPMPPTSP-DS/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019; - Perusahaan ini meiliki NIB Nomor 8120202990554 tgl 5 September 2018; - Pengolahan air limbah dilakukan dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.
PT. Bahari Makmur Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bahari Makmur Sejati beralamat di KIM I, Jl.Pulau Sumatera No.13 Kawasan Industri Medan I; - Perusahaan ini bergerak di bidang Industri pembekuan Udang; - Perusahaan ini mempunyai Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor 660/1965/BLH/VI/2013 instansi penerbit Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tanggal 18 Juni 2013; - Perusahaan ini telah memiliki Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/4711/BLH/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015; - Pengolahan air limbah dilakukan dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.
PT. Suri Tani Pemuka	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Suri Tani Pemuka Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun (Unit Processing Plant); - Perusahaan ini bergerak di bidang pembekuan dan pemasaran hasil perikanan;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini telah memiliki Dokumen UKL-UPL yang sudah direkomendasi oleh BLH Kabupaten Simalungun dengan nomor 619/SEKRT-2014 tanggal 17 Juni 2014; - Perusahaan ini telah memiliki Izin Lingkungan dari OSS tanggal 10 Agustus 2018 dan dari BLH Kabupaten Simalungun dengan nomor 188.45/620/SEKRT-2014 tanggal 17 Juni 2014; - Perusahaan ini telah memiliki NIB Nomor 8120001702648 tanggal 5 Agustus 2018; - Perusahaan memiliki IPAL Mandiri dengan kapasitas sekitar 3.562 m³.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.21.454.104,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.21.507.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,75%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini sudah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 99,75%.

Pelaksanaan tugas pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang. Untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-2 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Capaian Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW IV tahun 2022 tercapai 100% sesuai yang ditargetkan pada TW IV tahun 2022 sebesar 100%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi;
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya;
3. Untuk peningkatan Kopetensi diselenggarakan Bimtek.

Capaian IKU ini lebih besar 3,7% bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW IV tahun 2021 dengan capaian sebesar 96,3%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2022-2024. Capaian IKU ke-2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada **Tabel 14** berikut.

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Presentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Persentase (%)	Capaian tahun 2021	Persentase (%)
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100%	100%	96,3%	96,3%

Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada tahun 2022 lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

Perbandingan capaian pelaku usaha kelautan yang di periksa pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 dapat di lihat pada **Tabel 15** di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	Unit Usaha Hasil Pengolahan Ikan Yang Diperiksa Kepatuhan nya	117	85
2	Unit Usaha Yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan nya	52	32
3	Kapal Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan nya	1.766	1.715
4	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Yang Diperiksa Kepatuhan nya	78	80
Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		2.013	1.912

Berkurangnya jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhan nya pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 karena:

1. Adanya perubahan pada system pengawasan, dimana pada tahun 2022 pengawasan di laksanakan pada pelaku usaha dengan berbasis resiko dan sesuai dengan Perdirjen No. 6 Tahun 2021.
2. Anggaran untuk pengawasan sumberdaya perikanan pada tahun 2022 lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Pada tahun 2022 anggaran untuk pengawasan sumberdaya perikanan sebesar Rp. 769.125.000 sedangkan pada tahun 2021 anggarannya sebesar Rp. 1.088940.000,-

IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 16** berikut :

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian	100	100	100	100	100	100	100

pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 769.125.000 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp.767.909.509 atau sebesar 99,84%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini sudah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 99,84%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) pemeriksaan kepatuhan subsektor perikanan, antara lain: (1) Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan, (2) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan, (3) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan, (4) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan. Untuk Pembahasan capaian kepatuhan subsektor perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 17. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Penangkapan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen

2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Adapun capaian pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) yang dilakukan pada periode Triwulan IV tahun 2022 sebanyak 2 unit usaha. Dengan dilaksanakannya pengawasan pada TW IV tahun 2022 kepada 2 pelaku usaha tersebut, maka selama tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan sebanyak 27 pelaku usaha. Capaian pada tahun 2022 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021, karena pada tahun 2021 perhitungan capaian untuk subsector ini menggunakan perhitungan pada aplikasi SIMWASKAN sedangkan pada tahun 2022 menggunakan perhitungan pengawasan berbasis resiko sesuai dengan PERDIRJEN PSDKP No. 6 tahun 2021. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 sebagaimana **Tabel 18** dibawah ini:

Tabel 18. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Nasiruddin	- Pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal perikanan. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pemilik kapal perikanan Bpk. Nasiruddin telah memenuhi standar usaha KBLI yang tercantum dalam Permen KP tentang kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan usaha berbasis resiko dengan nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
PT. Sumatera Ocean Transindo	- PT. Sumatera Ocean Trasindo beralamat Jl. Jala IV No.32/34 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara; - PT. Sumatera Ocean Transindo memiliki 3 kapal angkut yaitu KM. Asahan jaya II, KM. Lima Dai 8, KM. Manindo Jaya; - Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109801641 yang diterbitkan 14 Agustus 2018 dengan kode KBLI 50142, dengan penyertaan modal dalam negeri;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 85%, dalam kategori Baik Sekali.
Mahal Sanusi	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0215010202445 yang diterbitkan 24 Desember 2020 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 67,56%, dalam kategori Baik.
Po Tjai	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0609210041753 yang diterbitkan 6 September 2021 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 66,7%, dalam kategori Baik.
PT. Sumber Mestika Davindo	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005893004 yang diterbitkan 30 Agustus 2018 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 68,81%, dalam kategori Baik.
Suno	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100851407 yang diterbitkan 10 Agustus 2018 dengan kode KLBI 03111, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 66,67%, dalam kategori Baik.
T. Syamsuar TM	- Usaha Penangkapan milik Bapak T. Syamsuar TM, dengan kode KBLI 02201001403850001; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik
Sulaiman Husen	- Usaha Penangkapan milik Bapak Sulaiman Husen, dengan kode KBLI 02200055625610001; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Syafuruddin	- Usaha Penangkapan milik Bapak Syafruddin, dengan kode KBLI 1217000682836; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Zefri Maulanan	- Usaha Penangkapan milik Bapak Zefri Maulanan dengan kode KBLI 0311210000021; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Ina Suryani	- Usaha Penangkapan milik Bapak Ina Suryani dengan kode KBLI 2211210031939;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	- Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 73,33 %, dalam kategori Sanagt Baik.
Usman Baem	- Usaha Penangkapan milik Bapak Usman Baem; - Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120110171347 - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
Muhammad Ambia	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120116261987, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 80 %, dalam kategori Baik Sekali.
Marzuki Usman	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 3003220055399, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65 %, dalam kategori Baik.
A Thaleb Hamid	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220203400864, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65 %, dalam kategori Baik.
Jusman K	- Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120013230942, dengan penyertaan modal dalam negeri; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 60 %, dalam kategori Baik.
Willy Wiharjo Sutanto	- Usaha Penangkapan milik Bapak Willy Wiharjo Sutanto; - NIB 0301220020407 - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 70 %, dalam kategori Baik
Bun Kuang	- Usaha Penangkapan milik Bapak Bun Kuang; - NIB 8120012162911 - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 75%, dalam kategori Baik Sekali
Acu Budi	- Usaha Penangkapan milik Bapak Acu Budi; - NIB 8120215062454 - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 68.5%, dalam kategori Baik
Gunawan	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Gunawan dengan NIB 8120104763314; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 78.2%, dalam kategori Baik Sekali
Dedy Suhendra	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Dedy Suhendra dengan NIB 8120104763314;

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
	- Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 82 %, dalam kategori Baik Sekali
Gan Tony	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Gan Tony dengan NIB 9120007631199; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 61,67 %, dalam kategori Baik
Tiong Kian	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Tiong Kian dengan NIB 912000282765; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 61.67 %, dalam kategori Baik Sekali.
Nursiah	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Nursiah dengan NIB 912000122578; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 67,4 %, dalam kategori Baik Sekali.
Muhammad Deny Saputra	- Usaha Penangkapan milik Bapak MUHAMMAD DENNY SAPUTRA dengan NIB 1312210013479; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 65 %, dalam kategori Baik
Jalai	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Jalai dengan NIB 2107220069265; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 70 %, dalam kategori Baik
Sie Tian	- Usaha Penangkapan Ikan milik Bapak Sie Tian dengan NIB 9120106491005; - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 64% dalam kategori Baik.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 297.650.547,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar RP. 297.699.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 99,98%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar yaitu 99,98%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa

(Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut.

Tabel 19. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pembudidayaan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Capaian pada TW IV tahun 2022 ini lebih kecil sebanyak 2 pelaku usaha bila dibandingkan dengan capaian pada TW IV tahun 2021, hal ini terjadi karena target terhadap sub iku ini telah terpenuhi pada TW III tahun 2022 sehingga pada TW IV tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan tidak melaksanakan pengawasan terhadap sub iku ini. Sedangkan selama tahun 2022 capaian pada sub iku ini mengalami peningkatan sebesar 2 unit usaha bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 80 unit usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor

pembudidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 sebagaimana

Tabel 20 dibawah ini:

Tabel 20. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2022

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	Waternis - Alfin Farm	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 86,5%, dalam kategori Baik.
2	Suhaimi - Graha Pratama Fish	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik
3	Firman Edi	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik.
4	Guntur	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik.
5	Johari	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 90,5%, dalam kategori Baik.
6	Rozali	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 87,1%, dalam kategori Baik.
7	Habil Rifqy	03254 - Pembesaran	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat,

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
		crustacea air payau	obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.
8	Fahrur Razi	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, benih berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Baik.
9	Berani Sembiring	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 75%, dalam kategori Baik.
10	Samudera Sitepu	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Kurang Baik
11	Jeremiah Tarigan	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 35%, dalam kategori Kurang Baik.
12	Abdul Latif Ginting	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.
13	Josep Ginting	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Belum Memiliki perizinan berusaha berbasis resiko berupa NIB dan juga belum memiliki standar usaha berupa CBIB. Pelaku usaha sudah menggunakan pakan dan obat yang sudah terdaftar di KKP; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55%, dalam kategori Baik.

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
14	Aquafarm Nusantara, PT	03222 - Pembesaran ikan air tawar di KJA	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, benih berasal dari unit pembenihan yang belum bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 96,6%, dalam kategori Sangat Baik Sekali.
15	Aquafarm Nusantara, PT	03326 - Pembenihan ikan air tawar	- Telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik tetapi belum memiliki sertifikat CPIB, benih berasal dari unit pembenihan yang belum bersertifikat, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 80%, dalam kategori Baik Sekali.
16	Syahrolisam	03221 - Pembesaran ikan air tawar di kolam	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 89,3%, dalam kategori Baik Sekali.
17	Ardianto	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 88,5%, dalam kategori Baik Sekali.
18	M.Ruslan	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 75,5%, dalam kategori Baik Sekali.
19	Azwar	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 78,75%, dalam kategori Baik Sekali.
20	Syahril	03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB;

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
			- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 83,05%, dalam kategori Baik Sekali.
21	Tuginem	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
22	Fauzi Ahmad	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
23	Sukatno	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
24	M. Tajriansyah	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 65%, dalam kategori Baik.
25	Zakaria Husen	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Tetapi belum memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 60%, dalam kategori Baik
26	Surya Windu Pertiwi, PT	03212 - Pembenihan Ikan Laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 96%, dalam kategori Baik Sekali.
27	Sukamto	03254 - Pembesaran	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
		crustacea air payau	yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
28	Wagiman	03254 - Pembesaran crustacea air payau	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan; - Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 77,5%, dalam kategori Baik Sekali.
29	Cahya Priyambada	03211 - Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
30	John Kennedy	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
31	Prayitno	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
32	Husni Thamrin	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan.
33	Ibrahim	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
34	Iswandi	03211	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini sudah memiliki NIB
35	Supendi	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan.
36	Johari	03211	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
			sesuai peruntukan. Perusahaan ini sudah memiliki NIB
37	Guntur	03211	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini sudah memiliki NIB
38	Zulkifli	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
39	Ismail M Jamin	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 69,8%, dalam kategori Baik .
40	Halim Al-Away	03251	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 92%, dalam kategori Baik Sekali.
41	Sugeng Radiantoro	03227	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 68,33%, dalam kategori Baik.
42	Triyuendri Ramadhan	03227	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 69,15%, dalam kategori Baik.
43	Ahmad Junawi	3227	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 63,32%, dalam kategori Baik.
44	Alan Purnama (Fish Hatchery Zameena)	3226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 71,66%, dalam kategori Baik Sekali.
45	Ril Efrison (Dolphin Farm)	3226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 72,5%, dalam kategori Baik Sekali.
46	SD. MINA JAYA /Sugiatno	03221	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 62,5%, dalam kategori Baik.
47	UPR Sucipt	03226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 74%, dalam kategori Baik Sekali.
48	UPR Tabri	03251	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 67%, dalam kategori Baik.
49	UPR Syafii	03251	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 67%, dalam kategori Baik.
50	UPR Daulay	03226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 70%, dalam kategori Baik Sekali.
51	Pokdakan Naga Sekata	03223	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 59,97%, dalam kategori Baik.
52	UPR Syamsul Bahri	03251	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 56,2%, dalam kategori Baik.
53	UPR Adam	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 59,7%, dalam kategori Baik.
54	PT. Suri Tani Pemuka	03222	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 99%, dalam kategori Baik Sekali.
55	Bapak Mahoni	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 74,5%, dalam kategori Baik Sekali.

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
56	Bapak Sunardi	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 75,3%, dalam kategori Baik Sekali.
57	Ibu Sahati	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 74,5%, dalam kategori Baik Sekali.
58	Bapak Ibrahim Usman	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 61,6%, dalam kategori Baik.
59	Marzuki Damhuri	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
60	Bapak Yusri	03254	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 70%, dalam kategori Baik Sekali.
61	Pembesaran Darlis Umar	03221	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 55,12%, dalam kategori Baik.
62	Boy Rianto	03221	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 68%, dalam kategori Baik.
63	UPR Stanum Hetchry (Jamaan)	03226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 70%, dalam kategori Baik Sekali.
64	UPR Maghfur	03226	- Nilai Kepatuhan pelaku usaha adalah 62,2%, dalam kategori Baik.
65	UPR Faiq Fish Farm	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
66	UPR Mina Kampar	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
67	UPR Raka Fish Farm (Joko Suroso)	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
68	UPR Liok Lengkok	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
69	UPR Sumber Rezeki Patin	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
			adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
70	Suharyani	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
71	Winarti	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
72	Embuh Efendi	03226	- Telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
73	Nurhadi Rachman	03226	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
74	Taufik Hidayat	03226	- Telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
75	Expravet Nasuba, PT	03221 dan 03226	-
76	Syamsudin	03221	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
77	Surya Windu Pertiwi, PT	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
78	Andri Gun (Pokdakan Blue Ocean Shrimp)	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
			dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB
79	M. Husen (Kakap Putih Kembang tani)	03252	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini belum memiliki NIB
80	Rahman (Pokdakan Pinto Raseuki Phonna)	03254	- Telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CBIB, obat dan pakan yang digunakan telah terdaftar di KKP dan sesuai peruntukan. Perusahaan ini telah memiliki NIB

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 330.563.688,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar 330.971.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu*) atau sebesar 99,88%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar yaitu 99,88%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang

dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut.

Tabel 21. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengolahan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan IV tahun 2022 sebanyak 45 unit usaha UPI. Capaian TW IV Tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 30 Unit usaha UPI bila dibandingkan dengan

capaian pada TW IV Tahun 2021 dengan capaian sebesar 15 Unit Usaha UPI. Dengan dilaksanakannya pengawasan pada TW IV tahun 2022 kepada 45 pelaku usaha, maka selama tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan subsektor pengolahan ikan kepada sebanyak 85 pelaku usaha. Capaian pada tahun 2022 ini lebih sedikit bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 20201, dimana capaian pada tahun 2021 sebanyak 117 unit usaha UPI yang diperiksa. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 sebagaimana **Tabel 22** dibawah ini.

Tabel 22. Pelaku Usaha Subsektor Pengolahan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	Hanafa Food	10794	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 61.7 % (baik)
2	PT. Sorby International Medan	-10213 - 10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (baik sekali)
3	UD Pangkaina	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik)
4	PT. Aquafarm Nusantara	10213; 10217	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali)
5	PT. Toba Surimi Industries	10221; 10222; 10213; 10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan
6	Indrawati	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik); belum memiliki SKP; belum memiliki LKU 6 bulanan; belum mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi; belum melaporkan catatan produksi
7	PT Yasuriang Samudera Rezeki	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 68 % (baik); belum memiliki SKP; belum memiliki LKU 6 bulanan
8	PT Karunia Samudera Jaya	10213	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik)
9	PT Karya Agung Lestari Jaya	10213; 10214; 10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan
10	PT Red Ribbon Indonesia	10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan

11	PT Halindo Berjaya Mandiri	10217	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 58,16 % (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum memiliki informasi usaha dan nomor kontak yang dapat dihubungi; belum menerapkan prosedur efektif terkait perencanaan, komunikasi, dan risiko; belum menetapkan dan belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha
12	PT Anugerah Keramat Indah	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 82 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha
13	Semangat Baru	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 82 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum melakukan pencatatan perkembangan kegiatan usaha
14	PT Seafood Samudera Pacific	10293 10213	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali).
15	PT Seafood Sumatera Perkasa	10293 10213	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali).
16	Maysaroh - Jamaluddin		Nilai kepatuhan UPI Masyitoh / Jamaluddin pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65 % (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum menerapkan kesesuaian SDM; belum memiliki layanan kontak untuk layanan konsumen
17	Rairuddin		Nilai kepatuhan UPI Rairuddin pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65 % (baik); UPI belum memiliki NIB; belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan; belum menerapkan kesesuaian SDM; belum memiliki layanan kontak untuk layanan konsumen
18	PT Medan Tropical Canning and Frozen Industries	10213; 10293; 10299; 10221; 10222	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali)

19	PT Asahan Hasil Laut	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 72 % (baik sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki sistem manajemen usaha
20	Hasan		Nilai kepatuhan UPI Hasan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 45 % (kurang baik); UPI belum memiliki NIB, SKP, maupun HACCP
21	UD Sulthan	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 95 % (baik sekali); UPI belum memiliki informasi fee yang jelas
22	PT Mutiara Laut Abadi	10213;10221;10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100 % (baik sekali).
23	UPI Mr. Phep	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 60 % (baik); UPI belum memiliki persyaratan khusus usaha
24	PT Ayu Bumi Sejati	10293	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 88.9 % (baik sekali); UPI belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
25	UD Garuda	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 95 % (baik sekali); UPI belum memiliki informasi fee yang jelas
25	Lia Diana	10216	1. Melengkapi SKP 2. Membuat laporan Kegiatan Usaha
27	CV. Batubara Negeriku	03133	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 95 % (baik sekali); UPI belum memiliki informasi fee yang jelas
28	UD. Pasmenang	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65 % (baik); UPI belum memiliki dokumen pendukung seperti NIB dan SKP
29	Sedap Bakat	10212	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik); UPI sedang melakukan perpanjangan pada SKP
30	PT Bahari Makmur Sejati	10293	Nilai Kepatuhan pada saat dilakukan penilaian yaitu 100
31	PT. Laut United	10213	Nilai Kepatuhan kegiatan usaha adalah 84 %
32	PT. Bumi Menara Internusa	10213 '10221	Nilai Kepatuhan pada saat dilakukan penilaian yaitu 100
33	CV. Surya Tirta Muara	03133	CV. Surya Tirta Muara termasuk usaha skala mikro dengan Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha adalah 100% (Baik Sekali)

34	PT. Suri Tani Pemuka	10213	PT. Suri Tani Pemuka telah memenuhi persyaratan Teknits dengan nilai 80% (Baik Sekali)
35	Nuraini	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70 % (baik);
36	Ng Tian Hok	10794	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 50 % (baik);
37	Ismail	10711	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 35 % kurang (baik);
38	Kelompok Pindang Jaya Bahari	10214	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 36.25 % kurang (baik);
39	Kelompok Sri Tanjung Abadi	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 30 % kurang (baik);
40	Mekar Rahmat Berkah	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 30 % kurang (baik);
41	Sri rahayu	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
42	Nurhasanah	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
43	Safaruddin	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
44	Nurdiani	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
45	Ayu Zubaidah	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
46	Kiki Hermaya	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
47	Laila (POKLAHSAR Udang Kecil)	10794	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 60 % (baik);
48	Agustinawati	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65 % (baik);
49	Jono	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65 % (baik);
50	Zayyan Home Made	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (Baik Sekali);
51	CV. Arlya Mandiri Perkasa	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (Baik Sekali);
52	CV. Satu Wahana Jaya Sentosa	10219; 10216	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 90 % (Baik Sekali);
53	CV. Hadi Wijaya Abadi	10217	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (Baik Sekali);
54	CV. Mekar Raya	10217	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 80 % (Baik Sekali);
55	Annisa	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 45 % kurang (baik);

56	Nilawati	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 45 % kurang (baik);
57	Nurmaria	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 42.5 % kurang (baik);
58	Salbiah	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 42.5 % kurang (baik);
59	Mustafa Kamal		Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
60	Sam Suriati		Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 70% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
61	M Zubir		Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 73,3% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
62	Ibu Kasminati		Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 73,3% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
63	Efendi		Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 84 % (baik Sekali); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
64	Husni	10779	Usaha pengolahan merupakan usaha skala kecil dan belum memiliki izin usaha
65	Yusron	10211	Usaha teh memiliki NIB dan SIUP tetapi belum di update ke OSS RBA, Nilai Kepatuhan Teknis 50% karena belum memenuhi persyaratan khusus
66	Budin	10779	Usaha telah memiliki NIB dan SIUP tetapi belum di update ke OSS RBA, Nilai Kepatuhan Teknis 50% karena belum memenuhi persyaratan khusus
67	Priyanto	10780	Usaha belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
68	Hartanto	10211	Usaha telah memiliki NIB dan SIUP tetapi belum di update ke OSS RBA, Nilai

			Kepatuhan Teknis 50% karena belum memenuhi persyaratan khusus
69	Gumri Lubis	10212	Usaha telah memiliki NIB
70	Rudy	10213	Usaha telah memiliki NIB dan SIUP tetapi belum di update ke OSS RBA, Nilai Kepatuhan Teknis 50% karena belum memenuhi persyaratan khusus
71	Adi Syahputra	10780	Belum memiliki NIB
72	Nurhidayah	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
73	Erly Yunawati	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
74	Supardi	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
75	Zainuddin Lubis	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
76	Hermaya Dewi	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
77	Jumiana	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
78	Elida Sofa	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
79	Nurhayati	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
80	Setyaningsih	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
81	Sulastri	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
82	Sutikno	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik Sekali);
83	Syarifuddin	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 75 % (Baik);
84	Ridwan	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan
85	Junaidi	10211	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 65% (baik); UPI belum memiliki LKU 6 bulanan; belum memiliki laporan realisasi modal dan tenaga kerja 3 bulanan

Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada tahun 2022 ini telah sesuai dengan

rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra yaitu 100%. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86.058.525,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 86.168.000,- (*Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau sebesar 99,85%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,85% .

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

d. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

Tabel 23. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen

2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan IV tahun 2022 sebanyak 0 unit usaha. Capaian TW IV Tahun 2022 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian pada TW IV Tahun 2021 dengan capaian sebesar 1 Unit Usaha. Sedangkan selama tahun 2022 capaian pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebanyak 32 pelaku usaha. Capaian pada tahun 2022 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan capaian 52 pelaku usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP tahun 2022 sebagaimana **Tabel 24**.

Tabel 24. Pelaku Usaha Subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	PT. Sorby International Medan	46206	PT. Sorby International Medan memiliki nilai kepatuhan Baik Sekali sebesar 93%. PT. Sorby International Medan telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT. Lautan Persada	46206	PT. Lautan Persada telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	CV. Rezeki Kita	46206	CV. Rezeki Kita telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	PT. Anugerah Alam Industri	46206	PT. Anugerah Alam Industri telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
5	PT. Toba Surimi Industries	46339	PT. Toba Surimi Industries telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	UD. Budidaya	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
7	Anugerah Bintang Nelayan	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
8	MK	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
9	Kuala Hikmah	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
10	Bintang Terang	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
11	AC	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
12	Ang Tek Wie	47245	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 100% (Baik sekali)
13	PT. Halindo Berjaya Mandiri	46206	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 59,55% (Baik)
14	PT. Anugerah Keramat Indah	46206	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 55% (Baik)
15	Semangat Baru	46206	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 50% (Baik)
16	Syukri Sulaiman	47215	Usaha Bapak Syukri Sulaiman direkomendasikan untuk mengurus izin usaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
17	Junaidi	47215	Usaha Bapak Junaidi memiliki nilai kepatuhan Baik sebesar 70%. Usaha Bapak Junaidi direkomendasikan untuk mengurus izin usaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
18	PT. Asahan Hasil Laut	46206	Perusahaan telah melakukan/memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundangan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
19	CV. Hengly Jaya Gusatama	46206	Darihasil pemeriksaan teknis, bernilai 77,25 %, berarti kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan : SANGAT BAIK
20	Jono	46206	Darihasil pemeriksaan teknis, bernilai 62 %, berarti kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan : BAIK
21	CV. Batubara Negeriku	46206	Kepatuhan teknis bernilai baik (50.42). Usaha baru mulai merintis dan saat ini sedang dalam tahap pengurusan sertifikat HACCP.
22	Yanto	47245	Darihasil pemeriksaan teknis, bernilai 50 %, berarti kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan : BAIK
23	CV. Berkah Doa Ibu	46206	Darihasil pemeriksaan teknis, bernilai 57.5 %, berarti kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan : BAIK
24	CV.Wadi	47215	UD. Wadi memiliki nilai kepatuhan Baik Sekali sebesar 85%.UD. Wadi Belum memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
25	CV.King Of Milk Fish	46206	CV. King Of Milk Fish memiliki nilai kepatuhan Baik Sekali sebesar 74%.CV. King Of Milk Fish telah memenuhi persyaratan berizin berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
26	UD. Bina bersama	47215	dalam kegiatan pulbaket ini tidak ditemukan bahan berbahaya, dan emiliki kepatuhan 80 % dengan kepatuhan baik sekali
27	UD. Rindu Madina Fishery	47215	Usaha Rindu madina Fishery memiliki nilai kepatuhan 85% termasuk dalam kategori baik sekali
28	Budiyanto	47215	Skor Teknis Sangat Baik
29	CV. Hadi Wijaya Abadi	46206	Skor Teknis Sangat Baik
30	Koperasi Kerapu	47215	Skor Teknis Sangat Baik

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
31	Masri Z	47216	usaha bapak masri z memiliki nilai kepatuhan 90 % dengan kategori baik sekali
32	Wahana Laut	47215	Ud Wahana Laut memiliki nilai kepatuhan 80 % dengan kategori baik sekali

Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2022 sebesar 100%, capaian pada Triwulan IV tahun 2022 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.636.749,- (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 54.267.000,- (*Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 98,84 %. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,84%.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia

Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

3. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-3 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”**. Capaian IKU “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP” dengan target yang ditetapkan sebesar 87%. Salah satu tools yang digunakan adalah “Form Keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Belawan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Setiap Pokmaswas yang dianggap **aktif** bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video. Capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP pada tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target 87%. Capaian pada tahun 2022 ini tidak terlepas dari usaha Stasiun PSDKP Belawan yang terus berusaha meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan terutama yang berkaitan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan Pokmaswas yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, karena Pokmaswas ini merupakan kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Dengan diadakannya sosialisasi dan kerjasama dengan Pokmaswas tersebut, diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan peran aktif Pokmaswas.

Capaian IKU Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU pada tahun 2021 karena beda IKU. Capaian IKU ke-3 “Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP”, dapat dilihat pada **Tabel 25** berikut.

Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pokmaswas Yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	-	-	87	100

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 26** berikut :

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pokmaswas Yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2021 : Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	71	71	-	-	-
2022 : Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87	100	-	-	87	87	87

Adapun realisasi anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar Rp.57.895.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 57.895.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi

dengan Sesditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas.

Pelaksanaan tugas pengawasan pengawasan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

4. Sasaran Kegiatan 3.2 : Terselenggaranya Operasi Armada SDKP yang Efektif

Dalam rangka pencapaian SK 3.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas, IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas, IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP. IKU pada SK 3.2 ini baru ada pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Adapun capaian dari SK3.2 dapat dilihat pada **Tabel 27** sebagai berikut.

Tabel 27. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	87.5	89,7
2	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	-	-	87.5	92,125
3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	90	100

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada SK 3.2 ini karena hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan hari operasi kapal pengawas dan speedboat yang baik.
2. Terlaksananya perawatan kapal pengawas dan speedboat pengawas dengan baik sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
3. Monitoring terhadap kegiatan dan penyelesaian laporan kegiatan dilaksanakan dengan baik.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 28** berikut.

Tabel 28. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2021 : Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	-	-	0,78	1,8	-	-	-
2021 : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	0,028	0,11	-	-	-
2022 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87.5	89,7	-	-	87,5	87,5	87,5
2022 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87.5	92,125	-	-	87,5	87,5	87,5
2022 : Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	90	100	-	-	90	90	90

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.893.833.000 dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp.13.891.106.211 atau sebesar 99,98%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar

99,98%.Penjelasan masing-masing IKU pada SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

a. IKU Ke-4 Indeks Kinerja Operasi kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
- 5) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
- 6) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 7) Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
- 8) Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR.
- 9) Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, *destructive fishing* dan pelanggaran kelautan lainnya

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan patroli oleh 3 (tiga) unit kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu KP Hiu 01, KP Hiu 08 dan KP Hiu 16. Selama tahun 2022 KP Hiu 01, KP Hiu 08 dan KP Hiu 16 telah melaksanakan hari operasi dengan rata-rata 63 Hari Operasi. Hari operasi kapal pengawas tersebut telah mengalami revisi dari rata-rata 100 hari operasi menjadi 60 hari operasi. Revisi hari operasi ini dilakukan karena anggaran untuk operasi kapal pengawas di “AA” dan juga karena terjadinya kenaikan harga BBM kapal pengawas dari

Rp. 11.500 menjadi Rp. 22.000. Capaian Hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 29** berikut.

Tabel 29. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas Tahun 2022

Bulan	Kapal Pengawas		
	Hiu 01	Hiu 08	Hiu 16
Januari	15	12	18
Februari	18	0	5
Maret	10	0	15
April	0	23	7
Mei	8	8	2
Juni	12	0	0
Juli	0	0	8
Agustus	0	15	5
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Total	63	58	60

Dengan perencanaan dan pelaksanaan hari operasional kapal pengawas yang terlaksana dengan baik, maka pada tahun 2022 capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas tercapai sebesar 89,7 dari target 87,5. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 dan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada Tahun 2021. Capaian indeks operasional kapal pengawas dapat dilihat pada **Tabel 30** berikut.

Tabel 30. Capaian IKU Indeks Operasional Kapal Pengawas Tahun 2022

Kapal Pengawas	Kapal Perikanan yang Diperiksa		Coverage Area Pengawasan		Capaian Hari Operasi		Tindak Lanjut Target Operasi		Jumlah Tangkapan Illegal Fishing		Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang		Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal		Dukungan Kegiatan Tertentu (SAR, Ops Bersama)		Pengawasan Kawasan Konservasi		Total Nilai Indeks	Indeks per Satker
	TW IV		TW IV		TW IV		TW IV		TW IV		TW IV		TW IV		TW IV					
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
KP. HIU 01	124	101	0,17	0,17	62	63	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	94,29	89,7002
KP. HIU 08	116	54	0,18	0,18	58	58	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	84,31	
KP. HIU 16	120	93	0,62	0,62	60	60	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	90,50	

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dialokasikan sebesar Rp.13.845.917.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 13.843.190.211 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah) atau 99,98%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan

efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 99,98%.

b. IKU Ke-5 Indeks Kinerja Operasi SpeedBoat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
- 2) Persentase *Coverage Area* Pengawasan;
- 3) Persentase Capaian Hari Operasi;
- 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
- 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
- 6) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa.

Kategori Penilaian Kinerja sebagai berikut:

Interval	Nilai Kinerja
0 – 50	Tidak Baik
50 – 75	Kurang Baik
75 – 90	Baik
90 – 100	Sangat Baik

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan patroli oleh 1 (satu) unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Dolphin 014. Selama tahun 2022 Speedboat 014 ini telah melaksanakan hari operasi sebanyak 12 Hari Operasi. Hari operasi speedboat pengawas tersebut telah mengalami revisi dari 39 hari operasi menjadi 12 hari operasi. Revisi hari operasi ini dilakukan karena anggaran untuk operasional speedboat pengawas di “AA” semuanya. Capaian Hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 31** berikut.

Tabel 31. Capaian Hari Operasional Speedboat Pengawas Tahun 2022

Bulan	Hari Operasi Speedboat
Januari	0
Februari	4
Maret	8

April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Total	12

Dengan perencanaan dan pelaksanaan hari operasional speedboat pengawas yang terlaksana dengan baik, maka pada tahun 2022 capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas tercapai sebesar 92,13 dari target 87,5. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada Tahun 2021. Capaian indeks operasional kapal pengawas dapat dilihat pada table 32 berikut.

Tabel 32. Capaian IKU Indeks Operasional Speedboat Pengawas Tahun 2022.

No	Speedboat Pengawas	Kapal Perikanan yang Diperiksa (25%)			Coverage Area Pengawasan (25%)			Capaian Hari Operasi (25%)			Jumlah Tangkapan Illegal Fishing (15%)			Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (10%)			Total Nilai Indeks
		TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	
1	Dolphin 14	24	27	25	0,02%	0,014%	17,125	12	12	25	0	0	15	0	0	10	92,125

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dialokasikan sebesar Rp.47.916.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 47.916.000 atau sebesar 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

c. IKU Ke-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Kategori Penilaian Pemenuhan Logistik.

No	Nilai Interval Indeks Pemenuhan Logistik	Score	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP
1	0 - 25	D	Tidak Terpenuhi
2	26 - 50	C	Kurang Terpenuhi
3	51 - 75	B	Terpenuhi
4	76 - 100	A	Sangat Terpenuhi

Capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP pada tahun 2022 tercapai 100 dari target 90. Tercapainya IKU ini tidak terlepas dari peran aktif awak kapal pengawas dan penanggung jawab sarana prasarana di dalam pelaksanaan dan monitoring untuk pemenuhan dan penyelesaian pertanggung jawaban logistic atau kebutuhan 3 kapal pengawas yang berada di Stasiun PSDKP Belawan. IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.398.354.800,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.11.399.373.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 99,99%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%.

5. Sasaran Kegiatan 3.3 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK3.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-7 “Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”**. Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP pada TW IV tahun 2022 tercapai 100% sesuai yang ditargetkan pada TW IV tahun 2022 sebesar 100%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-7 sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik untuk pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana Stasiun PSDKP Belawan.
2. Tindak lanjut terhadap informasi atau laporan terkait terjadinya kerusakan atau perlunya perbaikan terhadap sarana dan prasarana terlaksana dengan baik.

Capaian IKU ini sama bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW IV tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2022-2024. Capaian IKU ke-7 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP, sebagaimana pada **Tabel 33** berikut.

Tabel 33. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Persentase (%)	Capaian tahun 2021	Persentase (%)
Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100%	100%	100%	100%	100%

IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 34** berikut :

Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100

Penjelasan Pencapaian IKU dari SK3.3 sebagai berikut.

a. IKU Ke-7 Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan meliputi: 3 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit *Speedboat* Pengawas.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW IV Tahun 2022 IKU Ke-7 tercapai 100% dari target 100%. Capaian iku pada tahun 2022 ini sama bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu 100%. Adapun perawatan yang telah dilakukan untuk 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan dapat dilihat pada **Tabel 35** sebagai berikut :

Tabel 35. Perawatan KP Hiu 01 ,KP Hiu 08 dan KP Hiu 16 Tahun 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas	Kegiatan Perawatan	Nomor SPK dan Tanggal SPK	Nomor BAST dan Tanggal BAST
1	Hiu 01	Docking	088/Sta.2/PL.421/IV/2022 Tanggal 4 April 2022	198/Sta.2/PL.430/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022
2	Hiu 08	Docking	088/Sta.2/PL.421/IV/2022 Tanggal 4 April 2022	198/Sta.2/PL.430/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022

3	Hiu 16	Perawatan Closet dan Rak Sabun	309/SPH/PM-BTM/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022	14 Juni 2022
---	--------	--------------------------------	---	--------------

Sedangkan untuk perawatan Speedboat yang telah di laksanakan pada tahun 2022 dapat di lihat pada **Tabel 36** berikut.

Tabel 36. Perawatan Speedboat Pengawasan Tahun 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan





Kondisi KP. Dolphin setelah perapian dempul



Pengupasan cat lama



Pengecatan lambung dan lunas kapal



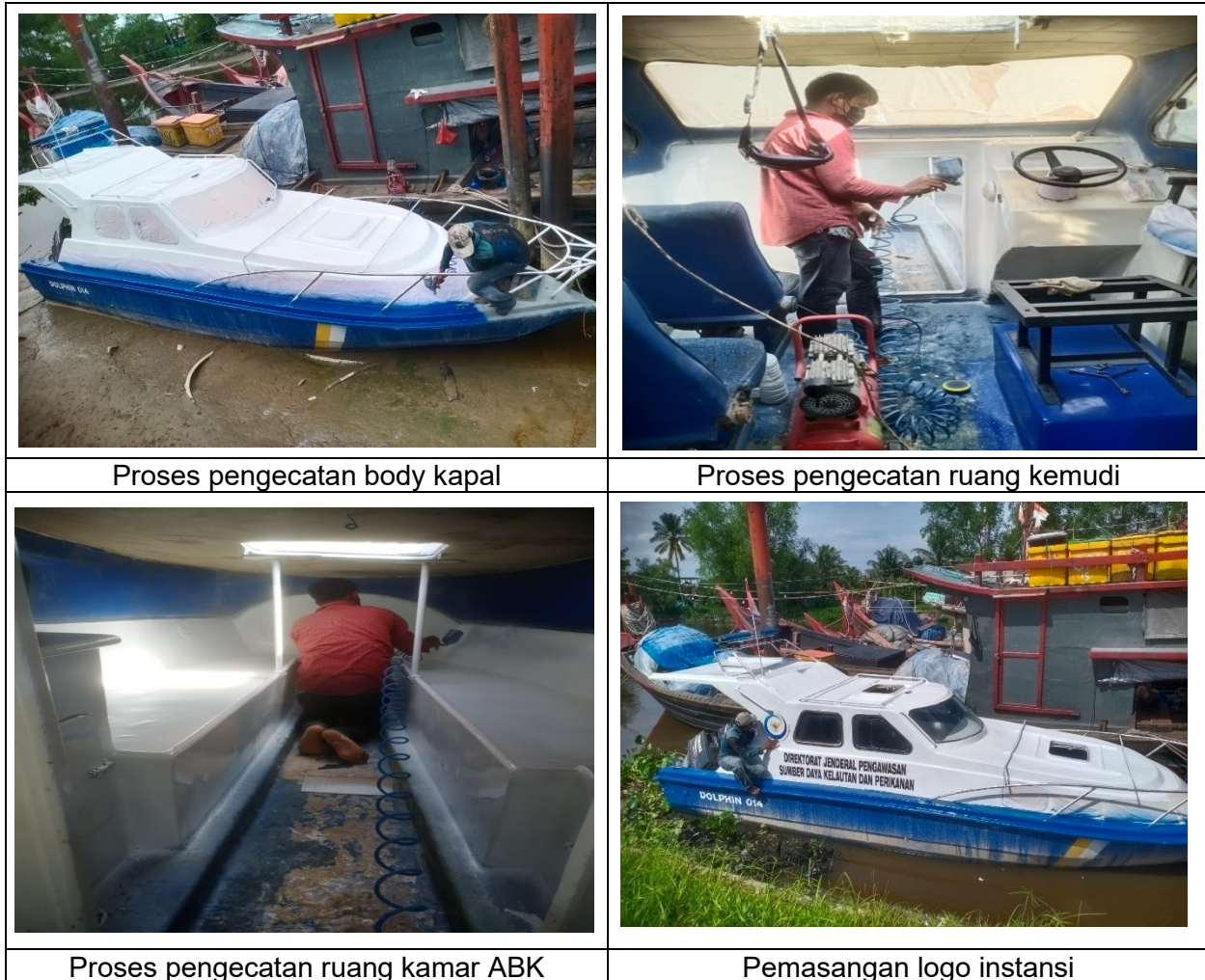
Pengecatan warna dasar



Kondisi KP. Dolphin setelah pengecatan dasar



Pengecatan warna putih



Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.270.027.332 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.3.270.506.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 99,99%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif

Dalam rangka pencapaian SK4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: **(1) IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP**

Belawan; (2) IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan; (3) IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (4) IKU Ke-11 Persentase Efektivitas penganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (5) IKU-12 Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif sebagaimana **Tabel 37** berikut.

Tabel 37. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	TARGET TW IV	CAPAIAN
1	Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	93	100
2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan	93%	93	100
3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan	93%	93	100
4	Persentase Efektivitas penganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	80	100
5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80%	80	100

Penjelasan pencapaian masing-masing IKU dari SK4.1 sebagai berikut:

a. IKU Ke-8 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan

mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW IV tahun 2022 IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan tercapai 100% dari Target 93%. Capaian IKU ini mengalami peningkatan sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 97,5%. Tercapainya target pada IKU ke-8 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-8 Persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana **Tabel 38** berikut.

Tabel 38. Capaian IKU Ke-8 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan

No	Perkara	Tersangka	Tanggal Tertangkap	TW IV		Capaian TW IV
				Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja	
1	KM. PKFB 1337	MUHAMMAD FITRIADI	13 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	100%
2	KM. KHF 1971	NAI TOO	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
3	KM. KF 2447	HERMANSYAH	22 Januari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
4	KM. PKFA 7496	JAKA SITORUS	5 Februari 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
5	KM. PKFA 9546	AUNG KYAW SOE	26 Maret 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
6	KM. KHF 1790	SOE TUN	23 Mei 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	

No	Perkara	Tersangka	Tanggal Tertangkap	TW IV		Capaian TW IV
				Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja	
7	KM. PKFB 1269	SU SU	8 Juni 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
8	KM. PKFB 1280	THET LWIN	8 Juni 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
9	KM. PKFB 316	YU HTWE	24 Agustus 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
10	KM. ANUGERAH REZEKI BARU	AHMAD SYAHRI TAMBUSE	29 Agustus 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	
11	KM. PANRAYA MAS	PUJIANTO	29 Agustus 2022	Tahap II (Surat Pengantar dan BA)	100%	

IKU ini merupakan iku baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	100	0	93	93	93	93

Untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 513.626.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.512.594.800,- atau 99,79%. Berdasarkan

analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan telah efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai dengan realisasi anggaran telah mencapai 99,79%.

b. IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Komponen penanganan barang bukti antara lain:

1. Penyitaan barang bukti;
2. Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti;
3. Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti tempat lain yang memadai;
4. penyerahan tahap II.

Pada TW IV tahun 2022 IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 100% dari Target 93%. Capaian IKU ini mengalami peningkatan sebesar 5,12% dibandingkan dengan Tahun 2021 yang capaiannya sebesar 94,88%. Tercapaiannya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan:

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

Adapun Capaian IKU pada IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan sebagaimana **Tabel 39** berikut.

Tabel 39. Capaian IKU Ke-9 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Stasiun PSDP Belawan

UPT	NAMA BARANG BUKTI UTAMA		NAMA TERSANGKA	POSISI BB UTAMA	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
STASIUN PSDKP BELAWAN	1	PKFB 1337	Muhammad Fitriadi	TPI Purnama Dumai	100%	100%
	2	KF 2447	Hermansyah	TPI Purnama Dumai	100%	
	3	PKFA 7496	Jaka Sitorus	TPI Purnama Dumai	100%	
	4	KHF 1971	Nai Too	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	100%	
	5	PKFA 9546	Aung Kyaw Soe	Dermaga Gudang Swasta Gabion - Belawan	100%	
	6	KM. KHF 1790	Soe Tun	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	100%	
	7	KM. PKFB 1269	Su Su	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	100%	
	8	KM. PKFB 1280	Thet Lwin	Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Langsa	100%	
	9	KM. PKFB 316	Yu Htwe	Gudang swasta di Gabion	100%	
	10	KM. Anugerah Rezeki Baru	Ahmad Syahri Tambuse	Gudang swasta di Gabion	100%	
	11	KM. Panra ya Mas	Pujianto	Gudang swasta di Gabion	100%	

Saat ini proses Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan telah dilakukan pemberian barang bukti identitas. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	100	0	93	93	93	93

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai tanggal 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.33.000.000,- atau 100% dari total anggaran Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan telah efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini sudah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

c. IKU Ke-10 Persentase Efektifitas penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada TW IV tahun 2022 IKU Ke-10 Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 100% dari Target 93%. Capaian IKU ini mengalami peningkatan sebesar 5,12% dibandingkan capaian Tahun 2021 yang sebesar 94,88%. Tercapainya target pada IKU ke-9 tersebut di karenakan :

1. PPNS Stasiun PSDKP Belawan telah banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyidikan perkara TPKP.
2. Tersusunnya jadwal PPNS Stasiun PSDKP Belawan di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan TPKP.

IKU ini merupakan iku baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	100	0	93	93	93	93

Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp.239.274.800,- dari total anggaran Rp.239.368.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,96%.

d. IKU Ke-11 Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada TW IV tahun 2022 IKU Ke-11 Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Adinistratif lingkup Stasiun PSDP Belawan tercapai 100% dari Target 80%. IKU ini merupakan iku baru yang baru ada pada tahun 2022 sehingga capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Tercapainya target pada IKU ke-11 tersebut di karenakan :

1. Terlaksananya pengawasan bidang kelautan dan perikanan di Stasiun PSDKP Belawan dengan baik.
2. Peningkatan pemahaman dari pengawas perikanan dengan mengikuti Bimtek yang di adakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.
3. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya.

IKU ini merupakan iku baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Adinistratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	100	0	0	93	93	93

Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp. 12.900.000,- dari total anggaran Rp. 12.900.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%.

e. IKU Ke-12 Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakkan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada TW IV Tahun 2022 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada tanggal 21 November 2022. Pada acara Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Hakim AD Hoc, Imigrasi, Polairud, TNI AL, DKP dan instansi terkait lainnya. Capaian IKU pada Tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target 80%. Tercapainya IKU ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terjalinnnya hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Belawan dengan Instansi terkait lainnya.
2. Kerjasama dari seluruh pegawai Stasiun PSDKP Belawan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan lancar

Capaian IKU ke-12 “Persentase Efektifitas Koordinasi dalam Rangka Penegakkan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena IKU tersebut baru masuk di tahun 2022. Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Efektivitas Koordinasi dalam

rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp. 50.505.425,- dari total anggaran Rp.50.714.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,59%.

7. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian SK5.1 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP" Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU dan 13 (tiga) IK. IKU tersebut terdiri dari: **(1) IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (2) IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks) (3) IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (4) IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (5) IK Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (6) IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; (7) IK Ke-19 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi); (8) IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (9) IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (10) IK Ke-22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (11) IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); (12) IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) (nilai); (13) IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai).**

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK5.1 sebagai berikut:

a. IKU Ke-13 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Ke-13 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan" merupakan kegiatan pengumpulan data dan Informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Capaian IKU Ke-13 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 87,53 dari target yang telah ditetapkan pada TW IV tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 109,41%. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan pelayanan penerbitan SLO oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi. Nilai survei kepuasan masyarakat pengguna layanan dapat dilihat pada gambar berikut 2 berikut



Gambar 2. Hasil SKM Pengguna Layanan SLO TW IV Tahun 2022

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan TW IV tahun 2021 terdapat penurunan capaian sebesar 1,39 karena capaian Pada TW IV tahun 2021 IKU ke-13 ini sebesar 88,92. Penurunan capaian dari tahun 2021 disebabkan karena adanya penyesuaian dalam penggunaan aplikasi terbaru dalam pelayanan SLO. Kedepannya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dari penyedia jasa dalam hal ini Stasiun PSDKP Belawan terhadap pengguna jasa layanan SLO mengenai hal teknis dalam pelayanan. Survei dilakukan terhadap 232 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1. Nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,387
2	Sistem. Mekanisme, Prosedur	3,401
3	Waktu Penyelesaian	3,581
4	Biaya/Tarif	4,000
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,550
6	Kompetensi Pelaksana	3,432
7	Perilaku Pelaksana	3,392
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,392
9	Sarana dan Prasarana	2,694

IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	87,53	0	80	80	80	80

b. IKU Ke-14 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-14 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan kegiatan pengumpulan data dan Informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Capaian IKU Ke-14 Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna LVHPI pada Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 90,92 dari target yang telah ditetapkan pada TW IV tahun 2022 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 113,65%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan capaian pada TW IV tahun 2021 IKU ke-14 mengalami peningkatan sebesar 0,45 dari indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI tahun 2021. Survei dilakukan terhadap 10 orang pengguna jasa layanan LVHPI yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dengan latar

Pendidikan dari SD, SMP, SLTA, DIII dan S1. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKPBelawan

Pencapaian IK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Pencapaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,500
2	Sistem. Mekanisme, Prosedur	3,600
3	Waktu Penyelesaian	3,500
4	Biaya/Tarif	4,000
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,500
6	Kompetensi Pelaksana	3,500
7	Perilaku Pelaksana	3,400
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4,000
9	Sarana dan Prasarana	4,000

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan pelayanan penerbitan LVHPI oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi. IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan

Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Perbandingan IK Ke-14 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	90,92	0	80	80	80	80

c. IK Ke-15 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan

Penilaian untuk IK Ke-15 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. IK ke-15 “Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” telah dilakukan penilaian mandiri dengan capaian 77,87 dari target 75. Keberhasilan dalam mencapai nilai WBK ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh pegawai stasiun PSDKP Belawan yang berusaha menerapkan integritas di dalam melaksanakan tugasnya dan juga mengadministrasikan kegiatan yang dilakukan secara baik. Capaian Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama Komponen	Nilai
1	Komponen Pengungkit	41,04
2	Komponen Hasil	36,83
Total Nilai		77,87

Capaian IK ke-15 “Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” mengalami penurunan sebesar 1,11 apabila dibandingkan dengan capaian Nilai WBK Tahun 2021 sebesar 78,98. Dalam rangka peningkatan target capaian Nilai WBK pada periode berikutnya, dilakukan perbaikan dalam penerapan poin-poin nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan.

Sedangkan untuk melihat perbandingan capaian IK ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75	77,78	0	75	75	75	75

d. IK Ke-16 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-16 yang digunakan adalah “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 77. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *asesment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *e-presensi mobile*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan IV Tahun 2022 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 82,17 atau 106,71% dari target tahun 2022 sebesar 77. Capaian Nilai IKU 16 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	76	12.17	48.68	40	100	25	83.33	5	100	82.17	Tinggi

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah pengikutsertaan seminar/workshop/bimtek oleh pegawai dan staf lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Keaktifan pegawai/staf lingkup Stasiun PSDKP Belawan dalam mengikuti seminar/workshop/bimtek berdampak langsung dalam peningkatan kapasitas SDM

pegawai dan staf tersebut yang berpengaruh pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IK Ke-16 “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” capaiannya mengalami peningkatan indeks sebesar 0,9 dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN pada Tahun 2021. Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada 2019 sampai tahun 2022 dapat di lihat pada **Tabel 43** berikut.

Tabel 43. Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
1	indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan	71,24	80,48	81,27	82,17

Sedangkan untuk melihat perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 44** berikut :

Tabel 44. Perbandingan Capaian IK “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
“indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	77	82,17	72	73	77	77	77

e. IK Ke-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pengukuran capaian indicator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu: 1) kepatuhan; 2) Aspek Kesesuaian; 3) Aspek ketercapaian; dan 4) Aspek Ketepatan. Pada Tahun 2022 IK Ke-17 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Llingkup Stasiun PSDKP

Belawan” memperoleh nilai sebesar 98,04 atau 108,93% dari target tahun 2022 sebesar 90. Adapun rincian nilai capaian IK Ke-17 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada tabel berikut.

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100,00	100,00	112,17	100,00
Skor Dikali Bobot	25,00	25,00	28,04	20,00
Total Skor	98,04%			

Capaian pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,96% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan nilai capaian sebesar 96,08%. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah sesuaiannya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Manual IKU dan Aplikasi KinerjaKu dalam satu kesatuan. Dokumen tersebut sangat diperlukan sehingga keakuntabilisan dan konsistensi berpengaruh pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 45** berikut :

Tabel 45. Perbandingan Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan	90	98,04	90	90	90	90	90

f. IK Ke-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen. PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari: (1) Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker; (2) Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Nilai capaian implementasi program budaya kerja lingkup stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2022 mencapai 26,67 atau 120% dari target yaitu 21. IK Ke-18 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IK ini baru ada di

tahun 2022. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target IKU ini dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan telah berusaha menerapkan butir-butir kegiatan pada budaya kerja di dalam aktifitas sehari-hari seperti telah menerapkan datang 5 menit sebelum kegiatan rapat dan juga telah di cantumkan di dalam undangannya.

Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 46** berikut :

Tabel 46. Perbandingan Capaian IK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai implementasi Program Budaya Kerja	21	26,67	-	-	21	21	21

g. IK Ke-19 Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-19 Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Perhitungan jumlah inovasi diperoleh melalui perumusan inovasi dari 5 (lima) Satuan Kerja Pusat. **Setiap Satuan Kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi.** Tahun 2022 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Capaian dari IK Ke-19 “Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” yaitu 1 (satu) inovasi sebagai kinerja organisasi atau 100% dari target. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2022 yaitu SILVER (Sistem Informasi Layanan LVHPI Terpadu). Capaian IK ke-19 Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2021 dikarenakan IK tersebut baru ada di tahun 2022. Dalam mencapai target inovasi ini Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk team GKT
2. Mengikuti asistensi dan arahan dari fasilitator PSDKP Pusat.
3. Mengadakan rapat internal melalui aplikasi zoom terkait pembahasan inovasi yang akan di hasilkan Stasiun PSDKP Belawan

Perbandingan capaian IKU “Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 47** berikut:

Tabel 47. Perbandingan Capaian IK “Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1	-	-	1	1	1

h. IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada tanggal 21 – 24 November 2022 telah dilakukan penghitungan capaian IKU ke-20 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” oleh Satker didampingi oleh Inspektorat II KKP. Berdasarkan hasil finalisasi dari pengukuran IKU Ke-20 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” memperoleh nilai capaian sebesar 100% dari target pada tahun 2022 sebesar 75. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui memorandum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 1895/PSDKP.1/HP.670/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Supervisi Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022. Capaian ini sama besar dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Keberhasilan di dalam mencapai target IKU “Tingkat Kepatuhan Pengeloaan BMN lingkup Stasiun PSDKP

Belawan” ini karena pengelolaan BMN yang dilakukan secara baik, dimana Dokumen RKBMN, Revaluasi Aset, BAST, dan Laporan BMN dilaksanakan dengan teratur dan dimonitoring oleh atasan.

Perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 48** berikut:

Tabel 48. Perbandingan Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75	100	-	75	75	75	75

i. IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP;
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE;
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Pada tanggal 21 – 24 November 2022 telah dilakukan penghitungan capaian IKU ke-21 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” oleh Satker didampingi oleh dan Inspektorat II KKP. Berdasarkan hasil finalisasi dari pengukuran IKU Ke-21 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” memperoleh nilai capaian sebesar 100% dari target tahun 2022 sebesar 75. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui memorandum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 1895/PSDKP.1/HP.670/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Supervisi Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pengelolaan BMN dan PBJ lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022. Capaian pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian Tahun 2021 yang hanya mencapai 96,29%. Tercapainya IKU “Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini karena:

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku;
- b. Pengelolaan dokumen PBJ yang dilakukan dengan baik;
- c. Keaktifan team pengadaan barang dan jasa yang memerlukan review dari tim inspektorat.

Perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 49** berikut:

Tabel 49. Perbandingan Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75	100	-	75	75	75	75

j. IK Ke-22 Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 86% pertriwulan pada tahun 2022. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan IV tahun 2022 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW IV sebesar 97,78% melebihi dari target yang ditetapkan pada TW IV yaitu sebesar 86%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IK pada TW IV tahun 2021, IK Ke-22 ini mengalami penurunan capaian sebesar 1,11% bila dibandingkan dengan capaian TW IV tahun 2021 sebesar 98,89%. Capaian IK Presentase unit kerja yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar berikut.

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Nilai Tahun 2022
JAKARTA	88.33%	100.00%	98.06%	100.00%	96.60%
BITUNG	88.33%	100.00%	100.00%	88.33%	94.17%
LAMPULO	100%	94%	92.22%	100.00%	96.60%
BATAM	98.89%	52.22%	100.00%	100.00%	87.78%
BENOA	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
TUAL	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
BELAWAN	87.22%	98.89%	98.89%	97.78%	95.69%

Gambar 4. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Keberhasilan untuk mencapai IKU ini di dukung oleh kelengkapan dokumen kinerja dan keaktifan dari pegawai untuk menyampaikan data, informasi dan kegiatan yang dilaksanakan di Stasiun PSDKP Belawan pada aplikasi Bitrix24.com. Dalam hal peningkatan persentase penerapan sistem manajemen kinerja pengetahuan yang terstandar pada periode berikutnya dilakukan perbaikan terhadap penyampaian data, informasi dan kegiatan agar dapat dilakukan secara *real-time*.

Perbandingan capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 50** berikut:

Tabel 50. Perbandingan Capaian IK “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan	86	97,78	82	84	86	86	86

k. IK Ke-23 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab). UPT yang tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan ditindaklanjuti maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Hal ini dikarenakan pengawasan Inspektorat Jenderal bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi. Pada TW IV tahun 2022, Stasiun PSDKP Belawan telah menindaklanjuti 3 rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dari 3 rekomendasi yang disampaikan sehingga capaian IKU ke 23 ini Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian 100% dari target 70%. Keberhasilan dalam mencapai IKU ini karena :

1. Peran aktif pimpinan di dalam melaksanakan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Adanya monitoring dari pimpinan terhadap pemenuhan tindak lanjut dari hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal agar diselesaikan tepat waktu.

IK ke-23 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW IV tahun 2021 dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2022. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2022 sebagai berikut.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Monitoring target jangka menengah telah dilakukan, namun masih secara insidentil, tidak terjadual dan tanpa SOP atau mekanisme yang jelas. Selain itu, monitoring target kinerja indivifu telah dilakukan, namun masih secara insidentil, tidak terjadual,tanpa SOP atau mekanisme yang jelas.	TUNTAS
2	Informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya dapat diandalkan. Hal tersebut karena terdapat 1 (satu) IKU dengan perhitungan yang tidak sesuai dengan data dukung, sehingga persentase capaian IKU belum sepenuhnya akurat yaitu pada IKU "Persebtase	TUNTAS

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan	
3	LKj menyajikan perbandingan realisasi vs target, kinerja tahun berjalan vs kinerja tahun sebelumnya serta kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah, namun belum menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi dengan instansi sejenis yang setara atau sekelas.	TUNTAS

Perbandingan capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 51** berikut:

Tabel 51. Perbandingan Capaian IK “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	100	-	-	70	70	70

I. IK Ke-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (Delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW IV Tahun 2022 sebesar 93,77%. Capaian Nilai IKPA pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,75% dibandingkan dengan capaian Nilai IKPA Tahun 2021. Target Nilai IKPA yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu dengan nilai BAIK (89). Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mencapai target ini, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dari pengelola keuangan dengan mengikutsertakan pegawai tersebut dalam Bimtek keuangan
2. Memonitoring kegiatan dan laporan keuangan di Stasiun PSDKP Belawan.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SIKP BELAWAN	Nilai	100.00	50.34	100.00	97.33	100.00	90.02	100.00	100.00	93.77	100%	93.77
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.03	20.00	9.73	10.00	9.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.17		97.47			100.00					

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Perbandingan capaian IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 52** berikut:

Tabel 52. Perbandingan Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	89	93,77	88	89	89	89	89

m. IK Ke-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2022 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Capaian IK ke-25 pada

periode TW IV tahun 2022 sebesar 86,25 dari target 81. Capaian pada TW IV tahun 2022 ini lebih kecil 1,86 bila dibandingkan dengan capaian TW IV tahun 2021 yang mencapai nilai 88,11. Untuk mencapai IKU ini Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan berupa :

1. Membuat rencana penarikan dana.
2. Melaksanakan rapat untuk menentukan jadwal kegiatan yang akan di laksanakan.
3. Monitoring penyelesaian pertanggungjawaban/ anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam hal peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada periode berikutnya, akan dilakukan koordinasi yang lebih baik dalam hal rencana penarikan dana serta monitoring pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Perbandingan capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 53** berikut:

Tabel 53. Perbandingan Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	81	86,25	-	86	81	81	81

C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 25 IKU dengan capaian 25 Kinerja tercapai 100%. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja tahun 2022 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan , Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

1. IKU-1 Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

2. IKU-2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan
Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

3. IKU-3 Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP(%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87	100	114,94%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	87	120	137,93%	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	87	100	114,94%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	Pada tahun 2022 tidak memiliki target pada IKU ini.
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87	120	137,93%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	87	100	114,94%	-

7	Stasiun PSDKP Kupang	87	100	114,94%	-
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87	120	120%	-

4. IKU-4 Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	85	85,58	100,68%
2	Stasiun PSDKP Biak	85	120	141,17%
3	Stasiun PSDKP Ambon	85	92,91	109,30%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	85	94	110,58%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	85	92,99	109,40%
6	Stasiun PSDKP Belawan	85	89,7	105,53%
7	Stasiun PSDKP Kupang	85	90	105,88%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	85	95,33	112,15%

5. IKU-5 Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	85	100	117,64%
2	Stasiun PSDKP Biak	85	116,51	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	85	89,75	105,58%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	85	100	117,64%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	85	88,50	104,11%
6	Stasiun PSDKP Belawan	85	92,13	108,38%
7	Stasiun PSDKP Kupang	85	97	114,11%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	85	99,14	116,63%

6. IKU-6 Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	90	100	111,11%
2	Stasiun PSDKP Biak	90	100	111,11%
3	Stasiun PSDKP Ambon	90	90	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	90	90	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	90	100	111,11%
6	Stasiun PSDKP Belawan	90	100	111,11%

7	Stasiun PSDKP Kupang	90	90	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	90	100	111,11%

7. IKU-7 Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

8. IKU-8 Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan Perikanan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	90	180%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%	-
7	Stasiun PSDKP Kupang	93	95	102,51%	-

8	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%	-
---	--------------------------	----	-----	---------	---

9. IKU-9 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,53%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%	-
7	Stasiun PSDKP Kupang	93	100	107,53%	-
8	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%	-

10. IKU-10 Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	50	66,7	133,40%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	93	100%	-

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	97,5	104,83%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	98	105,73%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%	-
8	Stasiun PSDKP Kupang	93	100	107,53%	-

11. IKU-11 Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%	-
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%	-

12. IKU-12 Persentase Efektifitas Koordinasi Dalam Rangka Penegakkan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	87,83	109,78%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-	Anggaran di "AA" sehingga IKU ini dihapus
8	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%	-

13. IKU-13 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	87,90	109,87%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	92,31	115,38%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,87	113,58%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	91,79	114,73%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	90,67	113,37%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	87,53	109,41%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	94,12	117,65%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,57	113,21%

14. IKU-14 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	98,31	122,87%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak memiliki target LVHPI
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	113,60%	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	Tidak memiliki target LVHPI
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,03	113,78%	-
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,92	113,65%	-
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	94,58	118,22%	-
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,35	112,93%	-

15. IKU-15 Nilai WBK (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	90,08	120,10%	-
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak memiliki target WBK
3	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-	Tidak memiliki target WBK
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	89,91	119,88%	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	83,31	111,08%	-

6	Stasiun PSDKP Belawan	75	77,87	103,83%	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	90,39	120,52%	-
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	89,68	119,57%	-

16. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77	80,17	104,11%
2	Stasiun PSDKP Biak	77	82,02	106,51%
3	Stasiun PSDKP Ambon	77	80	103,89%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77	80,17	104,11%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77	80,99	105,18%
6	Stasiun PSDKP Belawan	77	82,17	106,71%
7	Stasiun PSDKP Kupang	77	80,36	104,36%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	77	80,07	114,38%

17. IKU-17 Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	90	97,28	108,08%
2	Stasiun PSDKP Biak	90	96,29	106,98%
3	Stasiun PSDKP Ambon	90	95,92	106,57%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	90	97,20	108%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	90	98,04	108,93%
6	Stasiun PSDKP Belawan	90	98,04	108,93%
7	Stasiun PSDKP Kupang	90	96	106,67%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	90	97,03	107,81%

18. IKU-18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	21	26,27	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	21	25,84	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	21	23,18	110,38%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	21	27,34	130,19%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	21	23,69	112,80%

6	Stasiun PSDKP Belawan	21	26,27	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	21	25,02	119,14%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	21	26,85	120%

19. IKU-19 Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang Dihasilkan (Inovasi)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	1	1	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	1	1	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	1	1	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	1	1	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100%
8	Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100%

20. IKU-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	100	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	75	100	120%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120%

21. IKU-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	75	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	100	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	75	96,29	120%

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
8	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120%

22. IKU-22 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	86	98,06	114,02%
2	Stasiun PSDKP Biak	86	100	116,27%
3	Stasiun PSDKP Ambon	86	98,06	114,02%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	86	100	116,27%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	86	100	116,27%
6	Stasiun PSDKP Belawan	86	97,78	113,70%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	86	97,57	113,45%
8	Stasiun PSDKP Kupang	86	84,44	98,18%

23. IKU-23 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	70	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	70	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	70	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	70	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	70	100	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	70	100	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	70	100	120%
8	Stasiun PSDKP Kupang	70	100	120%

24. IKU-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	89	94,32	105,97%
2	Stasiun PSDKP Biak	89	96,68	108,62%
3	Stasiun PSDKP Ambon	89	86,62	97,32%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	89	98,19	110,32%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	89	93,39	104,93%
6	Stasiun PSDKP Belawan	89	93,77	105,36%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	89	96,08	107,95%

8	Stasiun PSDKP Kupang	89	97,57	109,62%
---	----------------------	----	-------	---------

25. IKU-25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	81	85,36	105,38%
2	Stasiun PSDKP Biak	81	85,99	106,16%
3	Stasiun PSDKP Ambon	81	86,62	106,93%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	81	91,43	112,87%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	81	84,46	104,27%
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	86,25	106,48%
7	Stasiun PSDKP Kupang	81	90,43	111,64%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	81	92,93	114,72%

D. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Stasiun PSDKP Belawan berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan sebesar 1,72.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Stasiun PSDKP Belawan berupa:

1. Pemanfaatan aplikasi Co-office yang telah di kembangkan oleh Ditjen PSDKP. Layanan perkantoran yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi (aplikasi). Sejak tahun 2021 Ditjen PSDKP sudah menggunakan aplikasi berupa e-report yang bertujuan untuk memperbaharui mekanisme penyampaian dan format laporannya serta memangkas waktu bekerja dalam penyusunan laporan mingguan.
2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi.
3. Optimalisasi penggunaan media daring untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Belawan

E. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2022 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA – 032.05.2.440831/2022 tanggal 14 Desember 2021, mendapat alokasi dana sebesar **31.915.391.000,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai dengan 31 Desember 2022 (Triwulan IV) sebesar **99,91%** atau sebesar Rp **31.886.058.309,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tuga Ratus Sembilan Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 54** berikut.

Tabel 54. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Desember 2022

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Peningkatan Operasional Pengoperasian Kapal Pengawas	17.222.234.000	17.219.028.543	99,98	3.205.457
2351	Program Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	577.240.000	576.000.225	99,79	1.239.775
2352	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	93.998.000	92.333.262	98,23	1.664.738
2353	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	769.125.000	767.909.509	99,84	1.215.491
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis	13.252.794.000	13.230.786.770	99,83	22.007.230

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Lainnya Ditjen PSDKP				
TOTAL		31.915.391.000	31.886.058.309	99,91	28.129.691

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada TW IV Tahun 2021 Nilai NPSS Stasiun PSDKP Belawan sebesar 106,76% dengan pencapaian 25 IKU Hijau (realisasi 100%).
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan Belawann) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
5. Melaksanakan perbaikan speedboat Napoleon 028 pada tahun 2023.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan melakukan monitoring dan rapat bulanan Triwulanan.
4. Mengajukan anggaran perbaikan speedboat Napoleon 028 pada pagu indikatif anggaran Tahun 2023.